

**ANALISA KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT
MUNDUR DARI PERJANJIAN INTERMEDIATE RANGE
NUCLEAR FORCE (INF) 2019**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

NURINDAH FITRIANA

07041381722196

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISA KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT
MUNDUR DARI PERJANJIAN INTERMEDIATE RANGE
NUCLEAR FORCE (INF) 2019

SKRIPSI

Disusun oleh

NURINDAH FITRIANA
07041381722196

Telah Disetujui oleh dosen penguji pada tanggal Mei 2021

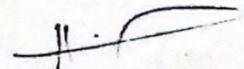
Pembimbing 1

Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003



Pembimbing 2

Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIDK. 8831999920


_____

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
ANALISA KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT
MUNDUR DARI PERJANJIAN INTERMEDIATE RANGE
NUCLEAR FORCE (INF) 2019

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 15 Juni 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dra. Retno Susilowati, MM
Ketua



Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
Anggota



Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
Anggota



Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
Anggota



Palembang, Juli 2021

Mengesahkan

Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si

NIP. 196311061990031001



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurindah Fitriana
NIM : 07041381722196
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisa Kepentingan Amerika Serikat Mundur Dari Perjanjian *Intermediate Range Nuclear Forces* (INF) 2019” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Nurindah Fitriana

NIM.07041381722196

HALAMAN MOTTO

“Tidak mungkin Allah mengecewakanmu, sedang hatimu dipenuhi keyakinan kepadaNya”

“Jadikan akhirat dihatimu, dunia ditangan mu dan kematian di pelupuk matamu.

–Imam asy-Syafi'i”

ABSTRAK

Perjanjian *Intermediate Range Nuclear Forces* diratifikasi pada 1 Juni 1988. Perjanjian ini mengatur kepemilikan senjata rudal balistik jelajah darat jarak menengah dengan jangkauan 500-5.500 km antara dua negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat pada masa era perang dingin. Pada 2 Agustus 2019 AS memutuskan untuk keluar dari perjanjian ini. Keputusan tersebut diambil karena AS mengklaim bahwa Rusia telah melakukan pelanggaran terkait kepatuhan didalam perjanjian ini dengan mengerahkan rudal yang dilarang didalam perjanjian ini yang bernama SSC-8. Namun Rusia secara tegas membantah tuduhan pelanggaran tersebut dengan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sikap AS didalam perjanjian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan apa yang menyebabkan AS untuk mundur dari perjanjian INF. Konsep yang digunakan didalam penelitian ini adalah kepentingan nasional (*national interest*) dalam aspek kepentingan pertahanan dengan berusaha menggambarkan situasi *dilema security* yang dialami oleh AS. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif (*Descriptive Analytis*). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh AS untuk mundur dari perjanjian ini disebabkan karena AS ingin mengejar kepentingan hegemoni dari dominasi China dikawasan Asia Pasifik. China bukan negara yang tergabung didalam perjanjian ini. AS merasakan dilema keamanan terhadap kapabilitas militeristik China terutama dalam pengembangan senjata rudal milik China yang telah mengancam keamanan pangkalan udara milik AS di kawasan Asia Pasifik. Dengan memutuskan keluar dari perjanjian INF AS dapat memberikan tekanan strategis terhadap China dengan kembali mengembangkan senjata nuklir yang sebelumnya dilarang didalam perjanjian INF.

Kata Kunci: Hegemoni, INF, Kepentingan Nasional, *Security Dilema*.

ABSTRACT

The Intermediate Range Nuclear Forces Treaty was ratified on June 1st, 1988. This agreement regulates the possession of cruise and ballistic missiles with range capabilities of 500-5,500 km between the two superpowers of the Soviet Union and the United States during the Cold War era. On 2nd August 2019 the US decided to leave this agreement. The decision was taken because the US claimed that Russia had committed violations related to compliance with this agreement by deploying a missile that is prohibited in this agreement named SSC-8. Russia has denied the allegations of violation by revealing its concern about the US stance on this agreement. This study aims to determine what interests led the US to withdraw from the INF treaty. The concept used in this study is the national interest in the aspect of defense interests by trying to describe the security dilemma situation that experienced by the US. The research method used in this research is descriptive analysis method. The results of this study aims to explain that the decision taken by the US to withdraw from this agreement was because the US wanted to pursue hegemonic interests from China's domination in the Asia Pacific region. China is not a country that joined in INF treaty. US feels a security dilemma regarding China's militaristic capabilities, especially in developing China's missile weapons which have threatened the security of US-owned air bases in the Asia Pacific region. By deciding to leave the INF treaty, US can exert strategic pressure on China by re-developing nuclear weapons that were previously prohibited in the INF treaty.

Keywords: Hegemony, INF, National Interest, Security Dilemma.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisa Kepentingan Amerika Serikat Mundur dari Perjanjian Intermediate Range Nuclear Forces (INF) 2019**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan oleh banyak pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dan menjadi *support system* selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM dan Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D selaku kepala jurusan Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik yang telah bersedia memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan berlangsung.
3. Bapak Drs.H. Fathurrahman, MM dan Ibu Hj. Zaimah selaku kedua orang tua penulis yang sangat penulis banggakan, atas segala restu doa dan kasih sayangnya yang tak pernah henti diberikan kepada penulis hingga detik ini, serta kepada seluruh keluarga penulis terkhusus adik laki-laki penulis M. Rizki Kurniawan yang menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh teman-teman semasa perkuliahan terkhusus kepada Dhenada, Vidya Mayma Suep, Rena Ning Tyas, Nurul Indraswari yang saling menghibur dan memberikan

support dari awal masuk perkuliahan hingga saat ini, semoga kelak dipertemukan Allah dengan kesuksesan masing-masing.

5. Teman kosan tercinta Putri Ranti Ayu Andori dan Finda Pratama Ramsay yang senantiasa menemani penulis hingga akhir penyusunan skripsi ini, serta Vedra Meriska Putri teman seperjuangan awal skripsi dan magang semoga Allah senantiasa istiqomahkan hati kita dalam kebaikan.
6. Teman semasa putih abu-abu Adraisna Airansi, Della Adinda Putri, Laily Kartika Sari, Yoan Andruya Arindy, Fina Safria Rahmah yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan apapun semoga pertemanan ini sampai kita tua.

Tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Namun penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan. Penulis sangat bangga dan bersyukur skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan, penulis hanya dapat menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang senantiasa membantu penulis, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak/Ibu dan teman-teman sekalian. Selain itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dalam kajian dan perkembangan jurusan Ilmu Hubungan Internasional Sriwijaya.

Palembang, 19 Mei 2021

Penulis,

Nurindah Fitriana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.2 Kerangka Konseptual.....	12
2.2.1 Kepentingan Nasional (<i>National Interest</i>).....	12
2.3 Alur Berfikir.....	15
2.4 Argumen Utama	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Desain Penelitian	17
3.2 Definisi Konsep.....	17

3.2.1 Perjanjian Intemediate Range Nuclear	17
3.3 Fokus Penelitian	18
3.4 Unit Analisis.....	20
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.7 Teknik Keabsahan Data	21
3.8 Teknik Analisa Data	22
BAB IV PERJANJIAN INTERMEDIATE RANGE NUCLEAR FORCES (INF)	23
4.1 Sejarah Terbentuknya Negosiasi Perjanjian INF	23
4.2 Dinamika Hubungan AS-Rusia Dalam Perjanjian INF	32
BAB V ANALISA KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT MUNDUR DARI PERJANJIAN INTERMEDIATE RANGE NUCLEAR FORCE (INF)	41
5.1 Kepentingan Nasional Pertahanan	41
5.1.1 Security Dilema	42
5.1.2 Hegemoni AS.....	49
5.1.3 Peningkatan Kapabilitas Militer AS.....	55
BAB IV PENUTUP	63
6.1 Kesimpulan	63
6.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	7
Tabel 3.1	18
Tabel 4.1.....	30
Tabel 5.1.....	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.....	15
-----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.....	28
Gambar 4.2.....	36
Gambar 4.3.....	37
Gambar 5.1.....	43
Gambar 5.2.....	44
Gambar 5.3.....	45
Gambar 5.4.....	46
Gambar 5.5.....	47
Gambar 5.6.....	50
Gambar 5.7.....	52
Gambar 5.8.....	59
Gambar 5.9.....	60

DAFTAR SINGKATAN

A2/AD	: <i>Anti-Access/Area-Denial</i>
AS	: Amerika Serikat
EPCI	: <i>Enhanced Proliferation Control Initiative</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GLCM	: <i>Ground Launch Cruise Missile</i>
INF	: <i>Intermediate Range Nuclear Forces</i>
NAIC	: <i>National Air Intelligence Center's</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
PACOM	: <i>Pacific Command</i>
PLA	: <i>People's Liberation Army</i>
SVC	: <i>Special Verification Commission</i>
WMD	: <i>Weapon Mass Destruction</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nuklir merupakan senjata pemusnah masal yang sangat berbahaya. Menurut *United Nations Office for Disarmament Affairs* senjata nuklir dapat melenyapkan seluruh kota dan juga berpotensi membunuh jutaan jiwa. Akibat bahaya yang ditimbulkan, penggunaan nuklir kemudian menjadi salah satu hal yang perlu sangat diperhatikan. Senjata nuklir merupakan salah satu masalah klasik dalam hubungan internasional (Marga Rettha, 2020). Sejak dimunculkan pertama kali oleh Amerika Serikat dalam Perang Dunia II dalam bentuk bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki bulan Agustus 1945 mengakibatkan 60.000-80.000 manusia tewas di Hiroshima dan Nagasaki, dan sekitar 135.000 orang terpapar radiasi akibat penggunaan nuklir tersebut. Senjata nuklir menjadi hal yang sangat menakutkan bagi komunitas internasional. Setiap pembahasan mengenai kepemilikan, pengayaan, dan uji coba senjata nuklir selalu mengundang kontroversi di tingkat internasional karena merupakan ancaman terhadap perdamaian internasional (Emilia Yustiningrum, 2007).

Pada perjalanan pengembangan teknologi senjata nuklir, beberapa negara tertarik untuk berlomba dalam meningkatkan kemampuannya untuk memproduksi senjata nuklir tersebut, yaitu Amerika Serikat & Uni Soviet. Terdapat beberapa macam pengembangan teknologi senjata nuklir, salah satunya dikenal dengan sebutan rudal atau misil. Perlombaan pengembangan rudal antar kedua negara tersebut terus berlangsung hingga akhir 1980 (Amanda Onion, 2019). Uni Soviet mengembangkan rudal SS-20 Saber misil ini disiapkan

untuk mengganti rudal SS-4 dan SS-5 yang sudah tua. Peningkatan rudal yang dilakukan oleh Uni Soviet mengancam kawasan Euro-Anlantik hal tersebut dikarenakan SS-20 mampu menjangkau seluruh kawasan Eropa Barat (Marga Rettha, 2020).

Menanggapi ancaman tersebut, *North Atlantic Treary Organization* (NATO) sebagai aliansi pertahanan di kawasan Euro-Atlantik mengadakan pertemuan khusus guna membahas strategi untuk menangkal ancaman tersebut, kemudian dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan sebuah strategi yang dikenal dengan *Dual Track Decision* terdiri dari *deployment track* dan *arms-control track*. Pada strategi *deployment track* NATO menyusun keputusan untuk mengancam Uni Soviet agar tidak melepaskan kendali misil SS-20 dengan meminta bantuan Amerika Serikat untuk menempatkan 108 Rudal Balistik Pershing II dan 464 *Ground Launch Cruise Missile* (GLCM) milik Amerika Serikat di kawasan Eropa Barat. Namun hal tersebut semakin memperkeruh masalah pada era perang dingin dan memicu perlombaan senjata, selanjutnya dari *arms-control track* menghasilkan kesepakatan negosiasi yang dapat mengatur kepemilikan dan peluncuran misil, dan berakhir dengan kesepakatan penandatanganan perjanjian *Intermediate-Range Nuclear Force Treaty* (INF) (Ulrich Kuhn A. P., 2017).

Perjanjian *Intermediate Range Nuclear Forces* (INF) resmi di ratifikasi pada 1 Juni 1988. Perjanjian ini merupakan bentuk negosiasi antara kedua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika Serikat, untuk mengurangi kesitegangan dikawasan Eropa Barat akibat penempatan SS-20 milik Uni Soviet dan penempatan rudal Pershing II & GLCM milik Amerika Serikat. (Berman, 2019) Perjanjian INF ini bertujuan untuk mengakhiri persaingan teknologi pengembangan senjata nuklir antara kedua negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat pada masa perang dingin. Isi dari perjanjian ini berguna untuk menghapuskan semua rudal

balistik jelajah darat jarak pendek dengan jangkauan 500 sampai dengan 5.500 kilometer dan rudal balistik jelajah darat jarak menengah dengan jangkauan 1.500 sampai dengan 5.500 kilometer selanjutnya perjanjian ini dapat dikatakan berhasil karena mampu menghapuskan 2.692 rudal balistik jelajah darat diantaranya 1.846 rudal milik Uni Soviet (SS-4, SS-5, SS-20 dan SS-23) dan 846 (Pershing II dan Gryphon GLCM) rudal milik Amerika Serikat dan hal tersebut dapat menjaga stabilitas keamanan di kawasan Eropa (Lanoszka, 2019).

Pasca penandatanganan perjanjian ini, terdapat perubahan kebijakan yang dilakukan oleh AS yakni memberhentikan produksi serta pengembangan rudal yang dilarang didalam perjanjian INF. Pada masa pemerintahan Presiden Bush kebijakan lain dibuat terkait perjanjian ini ialah pemberlakuan *Enhanced Proliferation Control Initiative* (EPCI) yang merupakan pembatasan ekspor senjata terkait *Weapon Mass Destruction* (WMD) serta perusahaan senjata yang berada di Amerika harus memperoleh ijin lisensi (David W. Kearn, 2012). Setelah pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, Amerika Serikat meminta kejelasan tentang kelanjutan perjanjian ini dengan enam bekas negara Soviet yakni, Rusia, Belarius, Kazakhstan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Awalnya perjanjian ini merupakan perjanjian bilateral antara kedua negara AS-Uni Soviet akhirnya berubah menjadi perjanjian multilateral dengan negara-negara bekas Soviet.

Pada akhir tahun 2000-an kekhawatiran Amerika Serikat terhadap perjanjian ini mulai tumbuh hal tersebut disebabkan adanya wacana Rusia untuk menarik diri dari perjanjian ini dan beranggapan bahwa perjanjian ini dinilai tidak adil bagi negaranya. Beberapa negara lain seperti China, Korea Utara, India, Pakistan dan Iran tidak tergabung didalam perjanjian ini. Sejak pertengahan 1990-an China telah memulai membangun persenjataan rudal jelajah darat terbesar dan paling beragam di dunia terdiri dari 2000 rudal balistik jelajah dan sekitar 95%

merupakan rudal jelajah darat menengah yang dilarang didalam perjanjian INF hal tersebut lantas menjadi tantangan yang mendesak bagi AS dan negara sekutu lainnya (Jacob Stokes, 2019).

Rusia beranggapan bahwa perjanjian ini pada dasarnya hanya menguntungkan AS karena AS tidak menghadapi ancaman regional. Namun pernyataan tersebut tidak digubris oleh AS dan menanggapi bahwa pernyataan tersebut sebagai bentuk pembelaan diri atas pelanggaran dalam perjanjian INF yang dilakukan oleh pihak Rusia. Direktur Intelijen Nasional AS didalam sebuah pidato tahun 2018 mengklaim bahwa Rusia memulai pengembangan rahasia rudal jarak menengah yang diluncurkan dari darat yang diberi nama 9M729 atau dikenal dengan SSC-8 yang memiliki kemampuan hulu ledak yang luar biasa, pada pertengahan 2000-an dan Rusia mulai menguji coba rudal tersebut pada akhir tahun 2000-an (Mark Etherton, 2019).

AS terus menerus mengirimkan laporan terhadap pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Rusia. Melalui laporan yang telah disampaikan tersebut AS memberikan penangguhan terhadap kasus yang di lakukan oleh Rusia. Pada 2014,2015,2016 dan 2017. Departemen Luar Negeri AS dan pejabat lainnya telah mengkonfirmasi bahwa Rusia telah melakukan pelanggaran kembali dengan mengerahkan rudal SSC-8. Tetapi Rusia tegas membantah tuduhan tersebut dan balik menyudutkan AS atas pelanggaran yang dilakukan yakni peluncuran Mk-41 Aegis Ashore. Pada 8 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis pernyataan tentang perjanjian INF dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat akan terus mematuhi kewajiban perjanjian INF, dan menyerukan kepada Federasi Rusia untuk mengambil langkah-langkah yang konkret untuk kembali patuh pada perjanjian INF serta memulihkan kepercayaan untuk mengelola stabilitas keamanan kawasan (Amanda B, 2019).

Namun secara mengejutkan pada 20 Oktober 2018 Presiden Donald Trump mengumumkan niatnya untuk melakukan penarikan diri dari Perjanjian INF. Keputusan ini diambil karena dinamika perselisihan antara AS dan Rusia yang tak menemukan titik terang serta ketidakpatuhan Rusia terhadap perjanjian INF (Woolf, 2019). Sebelumnya Rusia bekerjasama untuk mengadakan pameran SSC-8 untuk memberikan tranprasi atas tuduhan yang dilayangkan oleh AS. Melalui juru bicara kementerian luar negeri Rusia, menyampaikan bahwa rudal jelajah darat 9M729 sepenuhnya sudah sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam perjanjian INF dan menegaskan bahwa jangkauan rudal tidak melebihi 500 kilometer (Pifer, 2018). Atas pernyataan tersebut AS tetap bersikeras menanggapi bahwa Rusia telah melanggar perjanjian yang ada berdasarkan bukti yang ditelah dikumpulkan oleh AS selama beberapa tahun terakhir ini, walaupun sempat terjadi penangguhan keputusan untuk penarikan diri dari perjanjian tersebut. Akhirnya AS secara resmi memutuskan untuk keluar dari perjanjian INF pada tanggal 2 Agustus 2019 (Justin V., Anderson, Amy J. Nelson, 2019).

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengajukan judul skripsi sebagai berikut
“ANALISA KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT MUNDUR DARI PERJANJIAN INTERMEDIATE RANGE NUCLEAR FORCE (INF) 2019”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian dengan judul **Analisa Kepentingan Nasional Amerika Serikat Mundur Dari Perjanjian Intermediate Range Nuclear Force (INF) 2019** ini adalah : Apa saja kepentingan nasional Amerika Serikat untuk mundur dari perjanjian Intermediate Range Nuclear Force (INF) 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui apa saja kepentingan nasional Amerika Serikat untuk mundur dari perjanjian Intermediate Range Nuclear Force (INF) pada tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hubungan internasional terutama dalam bidang kajian keamanan internasional dan diharapkan dapat menambah pengetahuan para akademisi terkait faktor penentu kepentingan nasional Amerika Serikat untuk mundur dari perjanjian Intermediate Range Nuclear Force (INF) pada tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan untuk penelitian selanjutnya bahwa dalam setiap perjanjian yang dilaksanakan oleh suatu negara tidak terlepas dari kepentingan nasional (*national interest*) masing-masing negara. Apabila kepentingan tersebut tidak dapat tercapai maka negara dapat mengambil keputusan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut.

BAB II
TINJUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Nama Penulis	Arga Probowisesa
	Judul	Prospek <i>New Strategic Redution Treaty</i> dalam Kepemilikan Senjata Nuklir Amerika Serikat dan Rusia
	Sumber Skripsi	di akses dari https://core.ac.uk/download/pdf/77623392.pdf pada 16 Oktober 2020
	Tahun	2014
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menggunakan dasar pemikiran konsep <i>defensive strutural realism</i> , dimana penulis mengarahkan perhatian pada national security strategi AS & Rusia dan menjelaskan secara khusus kepentingan nasional masing-masing negara untuk membahas terkait berbagai variabel ancaman dan bentuk kerjasama dalam pengembangan isu nuklir. Penelitian tersebut menekankan pentingnya posisi kedua negara tersebut sebagai pemimpin dunia dalam kebijakan nuklir internasional. Didalam penelitian ini membahas tentang strategi nuklir kedua negara tersebut yakni Amerika Serikat dan Rusia yang saling berlomba

		<p>dalam pengembangan nuklir. Hingga pada akhirnya kedua negara ini sepakat melaksanakan diplomasi nuklir selama perang dingin. Sebanyak 18 perjanjian disepakati salah satunya <i>Intermediate-Range nuclear Treaty 1987</i>. Kerjasama diplomasi nuklir terus berlanjut hingga pasca perang dingin. Pertemuan-pertemuan terus diagenda untuk membuat kesepakatan baru yang disebut dengan <i>New Start</i> yang telah ditandatangani oleh presiden kedua negara, Barrack Obama dan Dimitry Medvedev pada bulan April 2010 di Praha. Kesepakatan diplomasi nuklir antara kedua negara ini tidak lain dinilai sebagai kepentingan masing negara dalam mencapai tujuan kepentingan nasionalnya (Probowisesa, 2014).</p>
	Perbandingan	<p>Penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan skripsi ini. Pertama, penelitian tersebut membahas kerjasama-kerjasama yang dilakukan kedua negara ini dalam pengembangan isu nuklir pada periode era perang dingin hingga pasca perang dingin, sedangkan penelitian ini membahas faktor kepentingan Amerika Serikat untuk mundur dari perjanjian nuklir yang telah disepakati yakni <i>Intermediate-Range Nuclear Force</i> pada 2019. Kedua penelitian ini menggunakan kerangka konsep <i>deensive struktural realism</i>, sedangkan didalam penelitian ini menggunakan kerangka konsep <i>national interest</i> dan <i>balance of power</i>. Ketiga pada penelitian ini menjabarkan tentang diplomasi kerjasama</p>

		nuklir AS dan Rusia sedangkan skripsi ini membahas tentang dinamika hubungan kedua negara ini terkait isu nuklir didalam perjanjian INF.
2.	Nama Penulis	Fakhrunisa
	Judul	Analisis Penarikan diri Amerika Serikat Dalam Perjanjian <i>Intermediate-Range Nuclear Forces</i> tahun 2018
	Sumber Jurnal	Jurnal Hubungan Internasional Vol 7(3) diakses dari https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3082 pada tanggal 11 Oktober 2020
	Tahun	2019
	Hasil Penelitian	Jurnal ini membahas tentang alasan AS melakukan penarikan diri dalam perjanjian Intermediate Range Nuclear (INF). Didalam jurnal ini dijabarkan bahwa alasan utama AS keluar dari perjanjian ini ialah dikarenakan, AS mengklaim adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia didalam perjanjian ini. AS secara resmi menyebut Rusia melakukan perjanjian INF pada akhir juli 2014 terkait kepatuhan dalam control, nonproliferasi, dan komitmen pelucutan senjata. Didalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan Rusia mempengaruhi keamanan AS maupun negara sekutunya yang tergabung di NATO. Sikap Rusia yang memilih diam terkait

		tuduhan tersebut menjadikan AS mengambil langkah pada 25 oktober 2019 untuk menanggukkan perjanjian INF (Fakhrunisa, 2019).
	Perbandingan	Didalam jurnal ini memiliki beberapa persamaan dengan tulisan ini yakni ialah pembahasan isu tentang keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian INF. Selain itu juga jurnal ini membahas dinamika AS-Rusia didalam perjanjian ini. Namun tulisan ini juga memiliki perbedaan dengan skripsi ini. Pertama jurnal ini menggunakan konsep teori Kerjasama Internasional sedangkan skripsi ini menggunakan konsep kepentingan nasional dan konsep dinamika keamanan. Kedua jurnal ini hanya membahas alasan AS keluar dari perjanjian INF sedangkan skripsi ini fokus membahas secara rinci faktor kepentingan dibalik AS mengambil keputusan untuk keluar dari perjanjian ini.
3.	Nama Penulis	Anderson, Justin V, Nelson dan Amy J
	Judul	<i>The INF Treaty: A Spectacular, Inflexible, Time-Bound Success</i>
	Sumber Jurnal	Jurnal Strategic Studies Quarterly Vol:13(2) diakses dari https://wmdcenter.ndu.edu/Publications/Publication-View/Article/1912791/the-inf-treaty-a-spectacular-inflexible-time-bound-success/ pada tanggal 29 Oktober 2020
	Tahun	2019
	Hasil Penelitian	Didalam jurnal ini membahas tentang sejarah dibentuknya

		perjanjian INF dan perkembangan perjanjian ini hingga menjelaskan dampak apa saja yang ditimbulkan dari dibentuknya perjanjian ini serta tantangan apa yang akan dihadapi oleh AS-Rusia terkait pengendalian senjata nuklir jarak menengah (Justin V., Anderson, Amy J. Nelson, 2019).
	Perbandingan	Walaupun terdapat kesamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi ini yakni sama-sama membahas tentang perjanjian INF namun terdapat juga perbedaan yang signifikan antara tulisan ini dan jurnal tersebut, yakni jurnal ini membahas tentang kemungkinan dampak dari tindakan AS menarik diri dari perjanjian INF, sedangkan tulisan ini fokus membahas secara rinci faktor penyebab tindakan tersebut.
4.	Nama Penulis	Clare Mills
	Judul	<i>Demise of the Intermediate-Range Nuclear Force (INF) Treaty</i>
	Sumber Laporan	Diakses dari https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8634/ pada tanggal 29 oktober 2020
	Tahun	2019
	Hasil Penelitian	Pada laporan ini menjelaskan penarikan diri AS dari perjanjian INF pada laporan ini juga memuat bagaimana latar belakang sengketa antara AS-Rusia, serta penolakan Rusia terhadap tuduhan pelanggaran yang di umumkan oleh AS. Pada laporan ini juga menjelaskan bagaimana respon Rusia terhadap keputusan

		Amerika Serikat untuk mundur dari perjanjian ini. Terakhir pada laporan ini juga menjelaskan bagaimana implikasi dari keluar AS dari perjanjian ini bagi keamanan Eropa dan pengendalian senjata di masa depan (Mills, 2019).
	Perbandingan	Terdapat perbedaan antara laporan tersebut dengan tulisan ini yakni, laporan ini tidak membahas tentang apa saja alasan dan faktor penyebab Amerika Serikat keluar dari perjanjian INF sedangkan skripsi ini mengkaji apa saja kepentingan AS dalam hal ini yang menyebabkan mundur dari perjanjian INF. Laporan ini hanya berfokus pada bagaimana implikasinya bagi keamanan eropa sedangkan tulisan ini menjelaskan dilema keamanan (<i>security dilemma</i>) yang di rasakan AS sehingga memutuskan untuk keluar dari perjanjian ini.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Salah satu konsep yang mungkin sangat populer dan familiar di kalangan penstudi Hubungan Internasional adalah kepentingan nasional (*national interest*). Selama negara-bangsa (*nation-state*) masih menjadi aktor yang dominan dalam hubungan internasional, maka konsep kepentingan nasional masih akan menjadi salah satu konsep dasar yang paling penting dalam studi HI. Selain itu banyak pakar HI hingga kini masih sepakat bahwa salah satu

determinan utama yang menggerakkan negara-negara dalam menjalankan hubungan internasional adalah kepentingan nasional. Konsep ini telah menjadi sentral dalam studi HI untuk kurun waktu yang sangat lama bahkan sejak kelahiran studi HI. Kepentingan nasional merupakan perangkat eksplanatori kunci (*key explanatory tool*) dalam memahami hubungan internasional, khususnya dalam analisis tentang diplomasi dan kebijakan politik luar negeri (Suryani, 2017).

Menurut Scott Burchill, kepentingan nasional merupakan motivasi dari negara dalam menjalankan kebijakan eksternal (hubungan luar negeri). Adapun menurut Charles Beard, kepentingan nasional adalah alasan negara di belakang tujuan-tujuan dan ambisi-ambisinya dalam menjalankan hubungan internasional. Pada intinya banyak ilmuawan HI menggunakan gagasan atau konsep kepentingan nasional untuk menggambarkan perilaku suatu negara dalam lingkungan global. Para penstudi HI mendefinisikan kepentingan nasional secara beragam. Beberapa penstudi HI menempatkan aspek perlindungan diri (*self-preservation*) terhadap integritas wilayah, kemerdekaan politik, dan institusi-institusi pemerintahan yang fundamental, dalam daftar utama kepentingan nasional. Sementara beberapa penstudi HI lainnya memfokuskan aspek-aspek seperti swasembda nasional, prestise, dan perluasan wilayah (*aggrandizement*). Adapun sejumlah penstudi HI lainnya lebih menekankan pada aspek-aspek moral, legal, dan ideologi ketika mengelaborasi konsep kepentingan nasional (Burchill, 2005).

Hans Morgenthau, seorang pakar yang dikenal sebagai pelopor realisme dalam studi HI, menyamakan kepentingan nasional dengan *power* yang ingin dikejar oleh suatu negara dalam hubungan internasional, yang dimaksud *power* disini ialah sebagai apa saja yang menjadikan dan mempertahankan kendali suatu negara terhadap negara lain. Morgenthau membagi kepentingan nasional kedalam dua tingkat, yakni kepentingan nasional primer

menyangkut perlindungan fisik, politik, dan budaya, serta keamanan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Tidak ada kompromi dalam mewujudkan keberlangsungan kepentingan nasional primer ini, bahkan suatu negara tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan hard power (perang) untuk hal itu. Adapun kepentingan nasional sekunder adalah segala kepentingan dari suatu negara yang masih dapat di kompromikan atau di upayakan dengan negara lain (Suryani, 2017).

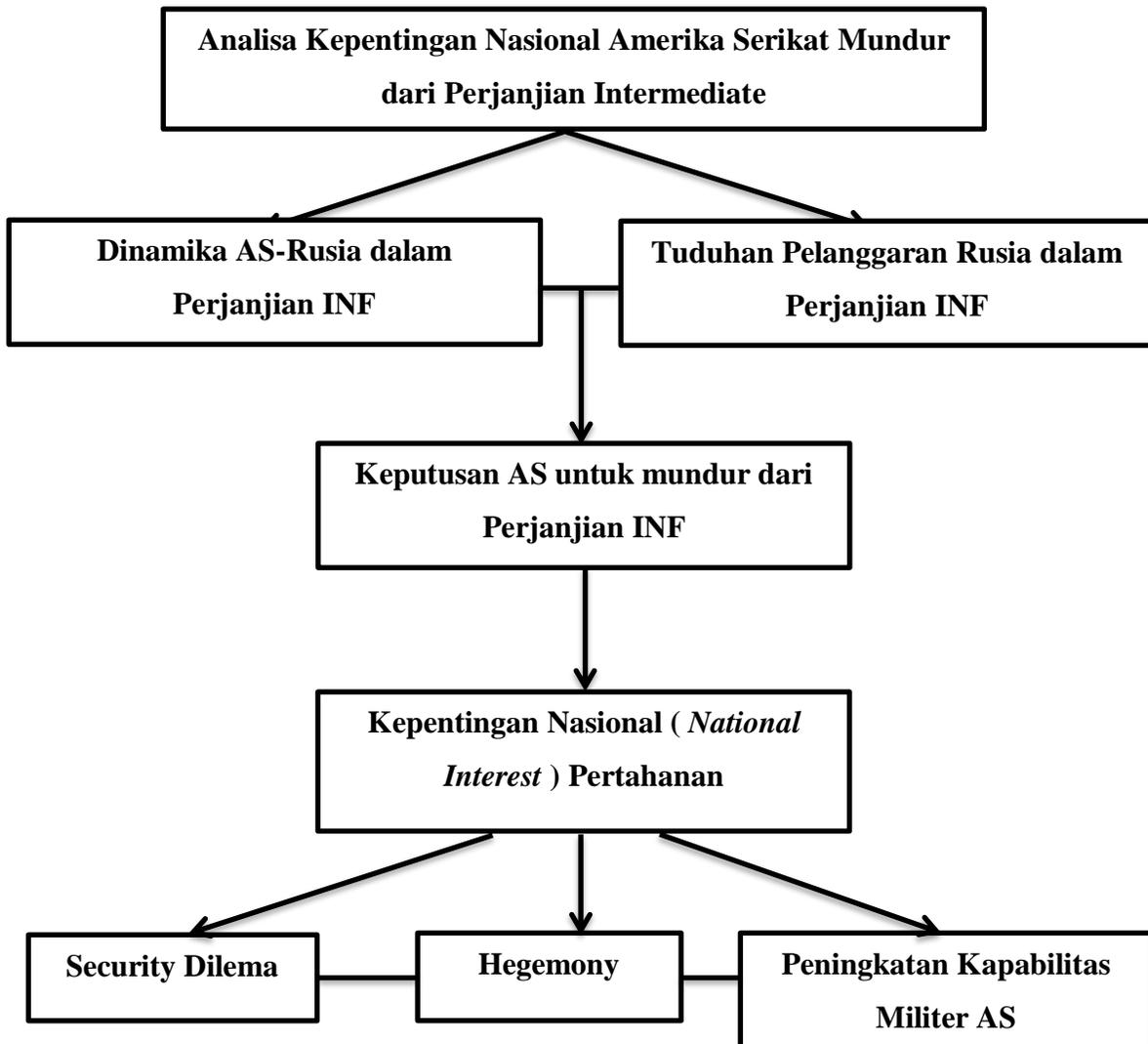
Menurut Clinton, Kepentingan nasional merupakan tujuan dan cita-cita negara untuk mensejahterakan masyarakatnya, sehingga negara merupakan aktor utama penggerak dalam keberhasilan pencapaian kepentingan nasional, dalam hal ini negara harus memiliki skala prioritas untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional mencakup berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, kepentingan pertahanan dan aspek lainnya (Clinton, 1986). Kepentingan pertahanan merupakan kepentingan yang memprioritaskan perlindungan atas bangsa dan warga negaranya terhadap ancaman terhadap sistem pemerintahannya yang bersifat internal maupun ancaman eksternal yang datang dari negara lain, adapun kepentingan ekonomi merupakan kepentingan yang memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi bangsa negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain (Suwarman, 2018).

Didalam penelitian ini kepentingan Amerika Serikat untuk mundur dari perjanjian INF 2019 adalah untuk mencapai kepentingan keamanan pertahanan dalam aspek militer. Hal tersebut disebabkan karena negara rivalnya yakni China tidak tergabung kedalam perjanjian ini. Dengan mengambil keputusan untuk mundur dari perjanjian ini maka AS dapat dengan bebas mengembangkan dan menguji coba senjata rudal jarak menengah yang sebelumnya

dilarang didalam perjanjian ini sebagai bentuk langkah untuk mengejar ketertinggalan hegemoni dari China.

2.3 Alur Berfikir

Grafik 2.1. Alur Berfikir



Sumber: Diolah oleh penulis

2.4 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, argumen penulis terhadap penelitian yang berjudul **“ANALISA KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT MUNDUR DARI PERJANJIAN INTERMEDIATE RANGE NUCLEAR FORCE (INF) 2019”** adalah dilihat dari kepentingan nasional dalam aspek keamanan menjadi faktor utama mengapa Amerika Serikat ingin menarik diri dari perjanjian INF 2019. Kepentingan Amerika Serikat yang dimaksudkan dalam hal ini ialah untuk mengejar hegemoni dari kekuatan negara lain yang tidak tergabung dalam perjanjian ini. AS ingin menyeimbangkan kekuatan militer negara dengan negara lain yakni China yang muncul sebagai kekuatan baru di wilayah Asia Pasifik yang memberikan ancaman keamanan bagi AS. Sejak tahun 2010 China telah memperkuat kemampuan rudal militer miliknya, termasuk didalamnya rudal militer jarak menengah yang dilarang dalam perjanjian ini, dengan memutuskan untuk keluar dari perjanjian ini AS akan meningkatkan kapabilitas militer miliknya dengan mengembangkan rudal yang sebelumnya dilarang didalam perjanjian ini sebagai bentuk langkah untuk mengejar langkah yang kompetitif dengan China.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan seluruh proses yang diperlukan didalam pelaksanaan penelitian, serta merupakan gambaran tentang keterkaitan hubungan antara variabel, pengumpulan data serta analisis data (Ali Sodik, 2015). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis deskriptif (*Descriptive Analytis*). Menurut Sandu Siyoto jenis penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena, peristiwa serta kejadian yang terjadi pada masa sekarang, dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta maupun hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya (Sandu Siyoto, 2015).

3.2 Definisi Konsep

3.2.1 Perjanjian Intemediate Range Nuclear

Perjanjian Intermediate Range Nuclear Force (INF) merupakan perjanjian yang disepakati pada tanggal 1 Juni 1988 antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk menghapuskan seluruh Rudal Balistik jarak menengah dalam jangkuan 500-5.500 km (Fakhrunisa, 2019). perjanjian tersebut menandai pertama kalinya negara adidaya AS dan Rusia untuk menyetujui pengurangan senjata nuklir. Dari hasil perjanjian tersebut berhasil

menghancurkan 2.692 rudal jarak pendek dan menengah. Namun pada tahun 2014 AS mulai mengeluarkan laporan atas ketidakpatuhan Rusia terhadap perjanjian ini, dan pada 2015 sampai dengan 2018 AS melaporkan kembali terkait tuduhan pelanggaran tersebut namun hal tersebut terus dibantah oleh pihak Rusia (Kimball, 2019). pada tanggal 2 Februari 2019 pemerintahan Trump secara resmi mengumumkan penangguhan kewajiban AS terhadap perjanjian INF dan pada 2 Agustus 2019 Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari perjanjian INF.

3.3 Fokus Penelitian

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Analisa Kepentingan Nasional Amerika Serikat Mundur dari Perjanjian <i>Intermediate Range Nuclear Force</i> (INF) 2019		1. <i>Security Dilema</i>	-Adanya ancaman keamanan bagi AS atas pengembangan militeristik senjata nuklir yang dilakukan oleh China yang tidak tergabung didalam perjanjian ini.

	<p>Kepentingan Nasional (<i>National Security</i>) dalam Aspek Pertahanan</p>	<p>2. Hegemoni AS</p>	<p>-Bertujuan untuk menyeimbangkan kekuatan militeristik negara lain yang tidak tergabung didalam perjanjian INF yakni China.</p>
		<p>3. Peningkatan Kapabilitas Militer</p>	<p>- Bertujuan untuk mengembangkan kembali senjata rudal yang dilarang didalam perjanjian INF sebagai salah satu strategi dalam peningkatan kapabilitas militer.</p>

3.4 Unit Analisis

Unit analisis merupakan bagian fokus ataupun komponen yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian yang akan diteliti (Muhlisin, 2012). Di dalam penelitian ini unit analisisnya merupakan unit analisis kelompok (negara) yakni Amerika Serikat.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan pembahasan penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk selain angka. Menurut Sugiyono jenis data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema dan gambar (Sugiyono P. D., 2015). Sedangkan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder, yakni sumber data melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, jurnal, catatan, maupun yang lainnya seperti arsip bukti yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum (Sugiyono P. D., 2015). Alasan penulis menggunakan sumber data ini agar dapat memudahkan penulis dalam memperoleh lebih banyak informasi dan dapat melihat berbagai macam perspektif sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini secara teoritis dan akurat.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sarana yang dapat membantu penulis dalam mendapatkan data di lapangan, yang membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*) dan Studi Dokumentasi.

1. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data *library research* dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis (Sugiyono P. D., 2015). Selain itu cara yang digunakan ialah dengan mendapatkan data dengan mencari data terkait yang berhubungan dengan penelitian melalui buku, jurnal maupun peristiwa aktual. Dalam hal ini penulis mencari data terkait faktor kepentingan AS mundur dari perjanjian INF.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji catatan peristiwa atau data yang sudah berlalu baik dalam bentuk tulisan, gambar ataupun karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan bisa berasal dari catatan harian, laporan maupun catatan sejarah lainnya (Sugiyono P. D., 2014). Dalam hal ini penulis mencari dokumen data terkait sejarah dan perkembangan perjanjian INF.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan proses dari pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian dengan menggunakan pemeriksaan keabsahan data agar diperoleh data yang tepat dan akurat (Hadi, 2016). Didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik keabsahan data meliputi tiga bagian yang pertama uji *creadibility* (validitas internal) merupakan uji kredibilitas data penelitian yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketelitian dan triangulasi atau pengecekan data dari berbagai sumber, yang kedua *dependability* merupakan uji reliabilitas atau data dengan menilai atau mengecek apakah proses penelitian sudah

dilakukan secara tepat, dan yang terakhir *confirmability* yang merupakan uji obyektivitas yang dilakukan dengan menganalisa apakah hasil penelitian telah disepakati banyak orang (Sugiyono P. D., 2014).

3.8 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data secara akurat yang diperoleh dari berbagai literatur. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Menurut Jack S Levy metode analisa data kualitatif cenderung menggunakan pendekatan secara historis dikarenakan bersifat lebih subyektif, metode ini menganggap penting adanya sebuah studi kasus didalam sebuah penelitian (Alexander Wendth, 2014). Teknik analisa kualitatif ini merupakan proses penelitian dan pemahaman sosial dan masalah manusia, prosedur dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan bukan berbentuk numeral ataupun angka (Sandu Siyoto, 2015). Teknik analisa kualitatif ini dilakukan dengan memperoleh data yang ada dari berbagai sumber seperti buku, media cetak, berita, dan literatur lainnya yang akurat.

BAB IV

PERJANJIAN INTERMEDIATE RANGE NUCLEAR FORCES (INF)

4.1 Sejarah Terbentuknya Negosiasi Perjanjian INF

Negosiasi mengenai perjanjian INF telah dimulai pada bulan November 1981. Perjanjian INF menjadi tonggak penting dalam hubungan antara Moskow dan Washington selama dekade 1980-an. Negosiasi perjanjian ini awal bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan sistem pengiriman senjata nuklir yang ada dengan ketentuan untuk menghapuskan semua jenis rudal jelajah darat milik Amerika Serikat dan Uni Soviet (Avis Bohlen W. B., 2012). Negosiasi terkait perjanjian ini berawal dari kekhawatiran yang cukup besar dari ekspansi militer yang dilakukan oleh Uni Soviet pada akhir 1970. Hal tersebut dilakukan atas bentuk perlawanan perang dingin yang terjadi antara Eropa Barat dan Eropa Timur yang sedang berlangsung (Fakhrunisa, 2019). Uni Soviet berhasil mengembangkan jenis rudal balistik misil jelajah darat yang kemudian menjadi ancaman bagi keamanan kawasan benua Eropa khususnya wilayah Eropa Barat. Misil yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada saat itu merupakan misil SS-20 Saber yang merupakan *ground launch ballistic missile* yang memiliki jangkuan mencapai 5.000 km.

Adanya ancaman yang dari Uni Soviet menimbulkan kekhawatiran terutama bagi negara-negara yang berada di kawasan Eropa karena kemampuan jangkuan dari Rudal SS-20 tersebut. Pasca penempatan Misil tersebut, aliansi keamanan dikawasan Eropa (NATO) mengadakan pertemuan untuk membahas ancaman tersebut. Tujuan utama dari NATO adalah membentuk strategi pertahanan secara kolektif guna melindungi negara yang tergabung

didalamnya, apabila salah satu negara anggota NATO menghadapi ancaman keamanan maka hal tersebut turut menjadi ancaman bagi semua negara-negara yang tergabung didalam NATO (Marga R, 2020).

Pada 1979 NATO's Nuclear Planning Group mengadakan studi terkait modernisasi INF jangka panjang, selanjutnya pada musim semi 1979 NATO membentuk Special Consultative Group khusus untuk merumuskan prinsip-prinsip panduan bagi upaya pengendalian senjata INF di masa depan. Hasil dari diskusi tersebut berhasil menghasilkan dokumen kebijakan untuk menetapkan tujuan dasar dari kontrol senjata dan modernisasi kekuatan INF (USA.gov, 2017). Pada 12 November 1979 para anggota NATO sepakat mengadopsi strategi jalur ganda atau yang dikenal dengan "*Dual Track Decision*" untuk melawan penyebaran Rudal SS-20 milik Uni Soviet (USA.gov, 2017).

Pada strategi jalur pertama yang pertama dikenal dengan sebutan *deployment track* yakni strategi dengan pendekatan negosiasi yang bersifat mengancam apabila Uni Soviet tidak setuju untuk menghilangkan Misil SS-20 di wilayah Eropa Barat maka, pihak NATO akan menempatkan 108 rudal balistik Pershing II dan 464 Ground Launched Cruise Missile yang diproduksi oleh Amerika Serikat di wilayah Eropa Barat (Ulrich Kuhn A. P., 2017) Kemudian pada strategi jalur kedua dikenal dengan *Arms-Control Track* yakni strategi yang dilakukan dengan mengajukan negosiasi terkait kepemilikan dan pengembangan misil antara negara adidaya untuk mengurangi senjata rudal kelas INF ketingkat serendah mungkin. Akibat pengaruh daya kekuatan misil yang dimiliki AS menjadikan Uni Soviet semakin merasa terancam untuk melakukan tindakan *preemptive strike* (Marga Rettha, 2020).

Sadari awal Rusia menolak secara langsung untuk terlibat kedalam diskusi negosiasi terkait pengendalian kontrol senjata INF dengan pengecualian apabila NATO mencabut

penempatan rudal miliknya di wilayah Eropa Barat. Dengan adanya fenomena tersebut akhirnya memicu ketegangan dan memparah situasi perang dingin yang sedang terjadi. Akibatnya strategi yang pertama ini dianggap gagal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun pada Juli 1980 posisi Soviet berubah dan awal diskusi dimulai di Jenewa pada musim gugur 1980 (USA.gov, 2017). Negosiasi ini mulai dilakukan kembali pada Januari 1980 tepatnya di Jenewa, Swiss. Pada masa kepemimpinan presiden AS Reagan dan 3 pimpinan perwakilan dari Uni Soviet yakni Leonid Breznev, Yudi Androvop dan Konstantin Chernenko. Pada negosiasi tersebut kedua belah pihak yakni AS dan Uni Soviet mengadakan diskusi yang disebut The Preliminary Intermediate Range Nuclear Forces Talks (Amy F, 2019).

Pada awal negosiasi putaran kedua ini, AS pertama kali mengajukan persyaratan terkait ketentuan negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni: (1) memberikan kesetaraan baik dalam batasan dan hak antara AS dan Uni Soviet; (2) benar-benar bersifat bilateral; (3) membatasi sistem secara global; (4) tidak mempengaruhi kemampuan pertahanan konvensional NATO; dan (5) dapat diverifikasi secara efektif (USA.gov, 2017). Selanjutnya dari pihak Uni Soviet mengajukan proposal untuk tidak menggerakkan misil yang telah ditempatkan dikawasan Eropa (Marga R, 2020).

Pada 18 November 1981 Presiden Reagan mengumumkan proposal negosiasi dimana AS akan setuju menghapus Pershing II dan GLCM miliknya jika Uni Soviet akan membongkar semua rudal SS-20, SS-4 dan SS-5. Keputusan AS tersebut dikenal dengan konsep "*Zero-Option*" yang berisikan ketentuan untuk pembongkaran rudal milik Uni Soviet, proposal ini pada dasarnya bersifat universal yang melarang pihak Uni Soviet dan menghentikan penyebaran rudal miliknya baik dikawasan Eropa maupun Asia. Dengan

melakukan pengurangan semua jenis rudal jarak menengah dengan jangkauan 5.00 km -1.000 km. Namun hal tersebut ditolak oleh pihak Uni Soviet dengan memutuskan untuk tetap menepatkan misil SS-20 diwilayah Eropa (Avis Bohlen W. B., 2012). Rencana kerjasama tersebut akhirnya mengalami kegagalan akibat masih terjadinya penyebaran rudal oleh masing-masing kedua belah pihak hingga periode 1983 (Fakhrunisa, 2019). AS terus menekankan preferensinya untuk “ Zero-Option” bahkan saat memperkenalkan konsep perjanjian INF, selama 1984 tidak ada negosiasi INF dan penyebaran rudal oleh AS tetap dilakukan sesuai rencana di wilayah Republik Federal Jerman, Italian dan Inggris Raya serta Belgia (USA.gov, 2017).

Setelah sempat terjadi gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pada tahun 1985, Uni Soviet dibawah kepemimpinan Gorbachev memulai kembali langkah negosiasi penyelesaian terkait permasalahan yang berlangsung dengan pihak AS dikarenakan kondisi ekonomi Uni Soviet yang sedang terpuruk pada saat itu. Keinginan yang sama pun ditunjukkan oleh pihak AS untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada diantara kedua negara terkait perlombaan pengembangan senjata rudal jarak menengah. Pada November 1985 Presiden Reagan dan Sekretaris Jenderal Gorbachev melakukan pertemuan kembali di Jenewa dimana keduanya sepekat untuk mengeluarkan pernyataan bersama yakni “ *interim accord on intermediate-range nuclear forces*” yakni kesepakatan sementara terkait kekuatan nuklir jarak menengah antara AS dan Uni Soviet. AS mengajukan proposal untuk mengusulkan pengurangan batas rudal milik AS di Eropa serta pengurangan rudal milik Uni Soviet di Asia dan menekankan batasan tambahan pada jarak rudal jarak pendek (USA.gov, 2017).

Sementara itu Uni Soviet pada 15 Januari 1986 melalui Sekretaris Jenderal Gorbachev mengumumkan proposalnya untuk mengusulkan agar semua jenis rudal jarak menengah SS-

20, GLCM dan Pershing II dihilangkan dari wilayah Eropa serta pihaknya akan turut mengurangi rudal yang mereka tempatkan di wilayah Asia (Avis Bohlen W. B., 2012). Kemudian pada akhir Februari 1986 AS mengusulkan kembali tawaran proposal untuk membatasi dan melakukan pengurangan proposional seluruh senjata rudal kelas jarak menengah di wilayah Eropa dan Asia secara bersamaan. Didalam proposal tersebut turut meminta agar kedua belah pihak baik AS dan Uni Soviet untuk mengurangi senjata kelas INF milik mereka yang tersisa di wilayah Eropa dan Asia dengan cara membatasi semua rudal secara merata kelevel yang lebih rendah dengan capaian target pada tahun 1989 untuk menyalakan semua jenis senjata INF (USA.gov, 2017).

Serangkaian diskusi tingkat tinggi terus berlangsung pada bulan Agustus dan September 1986 diikuti dengan pertemuan antara Presiden Reagan dan Sekretaris Jendral Gorbachev pada bulan Oktober 1986 di Reykjavik, Islandia, dimana kedua belah pihak sepakat untuk membatasi seluruh senjata kelas menengah milik mereka dan setuju untuk tidak mengerahkan rudal INF di wilayah Eropa. Setelah beberapa bulan pada 28 Februari 1987 Uni Soviet mengumumkan bahwa mereka telah siap untuk mencapai kesepakatan INF secara terpisah dan pada 4 Maret 1987 AS mengajukan draft teks Perjanjian INF yang berisikan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya di Reykjavik. Pada pertemuan bulan April Uni Soviet mengusulkan untuk kemungkinan penghapusan semua rudal jarak pendek AS dan Soviet, usulan tersebut di setuju dan mendapatkan dukungan secara penuh oleh seluruh menteri luar negeri NATO (USA.gov, 2017).

Pada bulan April 1987, Presiden Uni Soviet Gorbachev mengumumkan bahwa pihaknya telah siap untuk menyalakan semua misil jarak pendek yang memiliki jangkauan 300-600 km di wilayah Eropa dan Asia sebagai bagian dari perjanjian INF (Avis Bohlen W.

B., 2012). Kemudian Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev memutuskan untuk meratifikasi Perjanjian Intermediate Range Nuclear Forces (INF) pada 8 Desember 1987 tepatnya di Gedung Putih (Ulrich Kuhn A. P., 2017). Perjanjian ini mencakup *Memorandum of Understanding* (MOU) yang memuat data tentang Protokol Inspeksi dan Protokol Eleminasi, dilanjutkan dengan pertukaran nota diplomatik pada 12 Mei dan 21 Mei 1988 bertujuan untuk mengoreksi kesalahan dalam diagram situs dan teks perjanjian kemudian nota diplomatik ini turut serta dimasukkan kedalam teks perjanjian INF (USA.gov, 2017).



Gambar 4.1 Penandatanganan Perjanjian INF 1987
(Sumber: *INF Treaty U.S- Russian Outdated Pact* [14,p.67])

Perjanjian INF merupakan perjanjian yang mengatur pengendalian senjata nuklir jarak menengah atau *ground launch missile* (GLCM) yang memiliki jangkauan 500-5.500 km milik Uni Soviet dan AS. Dengan jangkauan tersebut senjata nuklir kedua negara tidak dapat menjangkau wilayahnya satu sama lain. Perjanjian ini juga melarang produksi, uji coba serta pengembangan seluruh jenis intermediate-range nuclear (Amy F, 2019). Kemudian dalam pelaksanaan perjanjian ini yang tercantum didalam Pasal XIII yakni Komisi Verifikasi Khusus

(SVC) yang berfungsi sebagai forum yang membahas terkait penyelesaian masalah implementasi dan kepatuhan untuk mempertimbangkan langkah-langkah guna meningkatkan efektivitas perjanjian dan untuk menentukan karakteristik dan metode penggunaan peralatan inspeksi (Amanda B, 2019).

Pada Desember 1988 kedua belah pihak menyetujui tentang prosedur inspeksi SVC dilokasi inspeksi masing-masing negara. Kedua negara menyetujui lokasi inspeksi yakni fasilitas Votksink milik Rusia dan Fasilitas Magna, Utah milik AS. Perjanjian INF menetapkan berbagai jenis inspeksi ditempat, diantaranya, inspeksi dasar untuk mengkonfirmasi pembaruan data awal, inspeksi fasilitas dan pangkalan operasi rudal dimana aktivitas INF dihentikan, inspeksi kuota jumlah atas fasilitas yang diumumkan sebelumnya oleh masing-masing pihak, dan inspeksi eliminasi untuk mengkonfirmasi penghapusan sistem INF sesuai dengan prosedur yang telah disepakati (USA.gov, 2017).

Selain itu juga AS menerima hak untuk memantau hingga 13 tahun atas akses atau portal ke fasilitas Uni Soviet yang memproduksi rudal balistik yang diluncurkan dari darat (GLCM) maupun yang tidak tercakup didalam perjanjian INF tetapi memiliki karakteristik yang mirip dengan GLCM. Uni Soviet didalam hal ini juga mendapatkan hak serupa untuk memantau fasilitas AS yang sebelumnya memproduksi senjata Pershing (USA.gov, 2017). Tiga tahun pasca berlakunya perjanjian ini akhirnya berhasil meredam konflik perang dingin senjata nuklir antar kedua negara adidaya, sekitar 2.692 rudal jarak menengah dlenyapkan, diantaranya 1.846 rudal milik Uni Soviet dan 846 rudal milik AS. Implikasi dari penandatanganan perjanjian ini memberikan dampak keamanan yang sangat besar khususnya bagi Eropa karena keberhasilan perjanjian ini dalam menghilangkan *intermediate-range nuclear forces* dari kawasan tersebut. (Ulrich Kuhn A. P., 2019).

Tabel 4.1 Daftar Sistem Rudal yang dieliminasi oleh Perjanjian INF

No	Jenis Rudal	AS	Uni Soviet
1.	Rudal Balistik	- <i>Pershing IA</i> - <i>Pershing IB</i> - <i>Pershing II</i>	-R-12 (SS-4 <i>Sandal</i>) -R-14 (SS-5 <i>Skean</i>) -OTR-22 (SS-12 <i>Scaleboard</i>) -RSD-10 (SS-20 <i>Saber</i>) -OTR-23 (SS-23 <i>Spider</i>)
2.	Rudal Jelajah	BGM-109G <i>Grphon</i>	3K12 (SSC-X-4 <i>Slingshot</i>)

Sumber: diolah oleh penulis dari buku *Asia-Pacific Regional Security Assessment* [4,p.66]

Namun pasca era perang dingin beberapa negara di dunia tertarik untuk mengembangkan rudal balistik jelajah jarak pendek dan jarak menengah yang dilarang didalam perjanjian ini sebagai salah satu strategi pertahanan militer mereka. Hal tersebut menciptakan ancaman baru bagi kedua negara yang terikat didalam perjanjian ini yakni AS dan Rusia. Menurut *National Air Intelligence Center's* (NAIC) telah mencatat perkembangan selama masa era perang dingin NAIC melaporkan pada tahun 1999 mencantumkan lima negara yang memulai memproduksi rudal jenis tersebut yakni China, India, Pakistan, Korea Utara dan Iran (Justin V., Anderson, Amy J. Nelson, 2019).

Menanggapi hal tersebut Rusia menyampaikan kekhawatirannya terkait perkembangan rudal yang dilarang didalam perjanjian ini oleh negara-negara tersebut. Menurutnya pertumbuhan rudal jarak pendek dan menengah walaupun terbilang lamban tetapi tetap stabil dan hal tersebut menimbulkan kekhawatiran yang semakin meningkat. Menteri Luar Negeri

Rusia Sergei Ivanov mempertanyakan apakah perjanjian ini masih menjadi kepentingan terbaik bagi pihaknya. Ivanov menyampaikan bahwa perjanjian INF saat ini bagaikan hanya peninggalan dimasa perang dingin dan memperkirakan perjanjian ini tidak akan berlangsung selamanya. Pada Konferensi Keamanan Munich 2007 Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa saat ini banyak negara lain yang memiliki rudal yang dilarang didalam perjanjian INF banyak negara yang sedang mengembangkan rudal tersebut untuk persenjataan mereka, dan hanya Amerika Serikat dan Rusia yang bertanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya terhadap perjanjian INF dalam kondisi ini maka pihaknya dan AS harus secara terbuka menanggapi hal tersebut apakah mereka harus mengambil keputusan untuk meninggalkan perjanjian ini (Justin V. A. A., 2019).

Kemudian pada bulan Oktober 2007 tepat 20 tahun berlakunya perjanjian INF, AS dan Rusia mengeluarkan pernyataan terbuka pada saat sidang PBB dengan memutuskan untuk tetap berada didalam perjanjian dengan meminta negara lainnya untuk mendiskusikan dan bergabung kedalam perjanjian INF, namun negosiasi tersebut tidak berhasil dilakukan. China dan negara lain yang telah mengembangkan rudal jarak pendek atau jarak menengah menolak untuk bergabung dengan perjanjian INF. China memberikan tanggapannya terkait negosiasi terhadap perjanjian tersebut, menurut pihaknya jika mereka bergabung kedalam perjanjian tersebut hanya akan menguntungkan satu pihak saja terutama AS dan dinilai akan membatasi pengembangan militernya. China menyatakan bahwa pengembangan rudal jarak menengah berbasis darat hanya untuk dikerahkan diwilayahnya sendiri dan untuk tujuan pertahanan bukan untuk menyerang pihak manapun (Douglas Barrie, 2020).

4.2 Dinamika Hubungan AS-Rusia Dalam Perjanjian INF

Pada akhir tahun 1991 Uni Soviet mengalami perpecahan menjadi 12 negara yang ditandai dengan pengambil alihan kantor-kantor pemerintahan oleh Rusia (Febrian, 2019). Amerika Serikat berusaha untuk meneruskan implementasi dari perjanjian INF secara multilateral dengan 12 negara bekas Republik Uni Soviet enam diantaranya yakni Rusia, Belarus, Kazakstan, Turkmenistan, Ukraina dan Uzbekistan memiliki basis lokasi fasilitas pengembangan senjata nuklir yang artinya menjadi bagian wilayah tempat pemeriksaan atau inspeksi perjanjian INF. Sejauh ini diketahui bahwa Amerika Serikat dan Rusia merupakan aktor sentral didalam perjanjian ini (Justin V. A. A., 2019).

Meskipun perjanjian INF berlaku untuk waktu yang tidak terbatas. Seiring berjalannya waktu perjanjian ini melemah. Komite verifikasi khusus (SVC) tidak lagi melakukan penyelidikan secara rutin terkait kemungkinan kasus ketidakpatuhan terhadap perjanjian INF. Kedua negara hanya bergantung pada inspeksi satelit masing-masing negara untuk memantau kepatuhan terhadap perjanjian INF. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi pihak senat intelijen AS dikarenakan pemantauan tersebut dianggap tidak dapat mendeteksi secara akurat terkait pengembangan ilegal GLCM (Alexander Lanoszka, 2019).

Perjanjian ini memasuki fase gejala pada akhir 2000-an. Pasca Vladimir Putin menjabat sebagai presiden Rusia terdapat perubahan komitmen Rusia didalam perjanjian INF (Marga Rettha, 2020). Putin menjadi lebih konfrontatif terhadap Amerika Serikat, menurut pihaknya bahwa AS telah mengambil keuntungan dari kelemahan Rusia atas perjanjian ini. Rusia mengungkapkan bahwa perjanjian ini hanya menguntungkan salah satu pihak yakni AS

yang tidak mengalami ancaman regional sehingga tidak memerlukan jenis senjata rudal yang terdapat didalam ketentuan INF (Ulrich Khun, 2020).

Pada 2013 mulai munculnya kekhawatiran AS terkait kepatuhan Rusia didalam perjanjian ini namun sebagian besar masalahnya tetap hanya rumor semata. Namun demikian, dinamika perjanjian ini semakin meningkat tepatnya pada bulan Juli 2014. Adanya laporan Kepatuhan yang dilayangkan oleh Departemen Luar Negeri AS. Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengirimkan laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Rusia (Alexander Lanoszka, 2019).

Dalam laporan yang diterbitkan pada 2014, Departemen Luar Negeri AS mengindikasikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Rusia yakni melanggar ketentuan yang ada didalam perjanjian INF untuk tidak memiliki, memproduksi atau melakukan uji coba GLCM dengan jangkuan jarak 500-5.500 km. Namun didalam laporan tersebut tidak disebutkan secara khusus nama rudal milik Rusia yang melanggar ketentuan didalam perjanjian INF melainkan hanya menyebutkan poin pelanggaran terkait pelarangan kepemilikan dan uji coba senjata nuklir GLCM yang dilakukan oleh Rusia (Kuczyński, 2019). Kemudian diadakan pertemuan secara khusus antara kedua belah pihak AS dan Rusia pada bulan September 2014 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun pertemuan tersebut gagal meredakan kekhawatiran AS, pihak Rusia menyangkal tuduhan laporan yang dilayangkan oleh AS dan mengeluarkan pernyataan tuduhan balasan bahwa pihak Washington lah yang didalam hal ini tidak patuh terkait ketentuan didalam perjanjian (Alexander Lanoszka, 2019).

Selanjutnya pada 2015 Rusia memulai produksi dan uji coba GLCM yang diberi nama 9M729 atau dikenal dengan sebutan SSC 8, rudal tersebut merupakan upgrade versi dari rudal sebelumnya yang bernama 9M728. Menurut *United States National Security Council*

Christopher Ford mengidentifikasi bahwa senjata tersebut memiliki jangkuan setidaknya 2.500 kilometer (Lanozka, 2019). Pada 2016 AS meminta untuk menetapkan komisi verifikasi khusus untuk menangani masalah kepatuhan Rusia. Tetapi Rusia membantah secara tegas bahwa senjata 9M729 telah melanggar perjanjian tersebut, dan akhirnya komisi tersebut gagal di bentuk (Kuczyński, 2019).

Wakil Kepala Staf Jenderal AS Paul J. Selva mengemukakan didepan Kongres AS pada Maret 2017 bahwa pelanggaran yang dilakukan Rusia akan menghadirkan resiko ancaman bagi keamanan NATO di Eropa. Kemudian Departemen Luar Negeri AS menawarkan untuk mengidentifikasi sistem 9M729 (SSC-8). Menurut AS rudal 9M729 telah di uji coba di wilayah Kaliningrad, Rusia pada November 2017 yang dikerahkan untuk latihan militer. Senjata rudal tersebut merupakan jenis rudal balistik jarak pendek yang memiliki jangkuan hulu ledak lebih dari 250 km. Hal tersebut telah menimbulkan kekhawatiran terutama di wilayah Polandia, Latvia dan Lituania karena wilayah pusat kota tersebut berada dalam jangkuan 400-500 km (Alexander Lanoszka, 2019) .

Pada 2017 selama tahun pertama masa jabatan Donald Trump, AS melakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian INF. AS mengeluarkan strategi kebijakan terkait untuk menyelesaikan dan menekan pihak Rusia agar kembali patuh terhadap perjanjian ini. Secara khusus AS akan terus mencari jalan resolusi konflik secara diplomatik terkait permasalahan yang ada, serta akan terus mengandalkan SVC didalam penyelesaian masalah kepatuhan perjanjian ini. Selanjutnya AS akan meninjau kembali semua sistem rudal jarak menengah, upaya ini dilakukan agar GLCM miliknya sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam perjanjian. Dan kebijakan terakhir yakni, AS akan mengambil tindakan ekonomi atau

pemberian sanksi terhadap perusahaan yang terlibat secara langsung didalam pengembangan senjata rudal milik Rusia yang melanggar ketentuan INF (Amy F, 2019).

AS menegaskan pernyataannya terkait keputusan mereka untuk tetap berada pada perjanjian ini dan menyerukan kepada Rusia agar kembali patuh terhadap perjanjian INF dan menghapus seluruh sistem rudal yang dilarang didalam perjanjian tersebut. Melalui Wakil Departemen Luar Negeri AS, Thomas Shannon menyampaikan bahwa Perjanjian INF merupakan pilar penting bagi keamanan dan stabilitas nuklir dunia. Sangat penting adanya transparansi dan prediktabilitas didalam ketegangan yang terjadi antara AS dan Rusia didalam perjanjian kontrol senjata (INF). Menurutnya pihaknya akan terus melakukan segala upaya untuk mempertahankan perjanjian ini dan akan terus mematuhi komitmen di dalam ketentuan perjanjian ini (U.S. Mission Russia, 2017).

Meskipun AS mengisyaratkan bahwa pihaknya akan terus berada didalam perjanjian INF. Pada 20 Oktober 2018 Presiden Donald Trump menyatakan niatnya untuk mundur dari perjanjian ini hal ini disebabkan karena pihak Rusia telah melanggar kewajibannya didalam perjanjian INF (Alexander Lanoszka, 2019). Pada November 2018 AS merilis pernyataan resmi yang berbunyi:

“Russia began testing the missile in the late 2000’s and by 2015 had completed a comprehensive flight test program consisting of multiple test of the 9M729 missile from both fixed and mobile launcher. Russia initially flight tested the 9M729 a ground based missile to distances well over 500 km from a fixed launcher” (Coast, 2018).

Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Daniel Coast Direktur Intelijen Nasional AS. Menurut pihaknya kemungkinan bahwa uji coba 9M729 dilakukan di wilayah Kapustin Yar, tempat situs peluncuran dan pengembangan senjata nuklir Rusia didekat kota

Volgograd. Pernyataan resmi ini dirilis terlebih dahulu sebelum pernyataan dari pemerintah Belanda dan Jerman yang mendukung oposisi AS terkait pelanggaran yang dilakukan Rusia (Alexander Lanoszka, 2019).



Gambar 4.2 Rudal Iskander-M atau 9M728 milik Rusia
(Sumber: *INF Treaty U.S- Russian Outdated Pact* [14,p.67])

Selanjutnya pada 26 November 2018 Rusia menanggapi tuduhan yang dilayangkan oleh AS. Melalui Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov memberikan pernyataan bahwa pihaknya sangat mengetahui kapabilitas senjata mereka secara sempurna, dan pihaknya tahu bahwa tidak ada satupun dari senjata nuklir mereka yang melanggar kewajiban mereka untuk patuh dibawah perjanjian ini (Kuczyński, 2019). Ryabkov menekankan bahwa rudal 9M729 merupakan versi upgrade dari rudal *Iskander-M* atau 9M728 yang lebih tua dan usang versi tersebut memiliki jangkuan 490 km. Sedangkan 9M729 yang diluncurkan di Kapustin Yar pada 18 September 2017 rudal tersebut hanya memiliki jarak maksimum sesuai dengan ketentuan yakni kurang dari 480 km. Artinya rudal tersebut berada dibawah ketentuan jarak

yang diizinkan didalam perjanjian INF. Pihak Rusia juga menegaskan bahwa test uji coba nuklir yang dilakukan dari tahun 2008 sampai dengan 2014 tidak pernah melebihi ketentuan batas didalam perjanjian tersebut yakni 500-5.500 km (Alexander Lanoszka, 2019).



Gambar 4.3 Rusia menampilkan rudal 9M729 yang dituduh oleh AS dan Sekutunya melanggar perjanjian INF.

(Sumber: *The End of The INF treaty: Implications For Asia* [4,p.66])

Pada 23 Januari 2019, Kementerian Pertahanan Rusia melakukan tranprasi kepada militer dan media asing dengan melakukan pameran rudal 9M729 kepada halayak publik, Rusia melalui Jenderal Pasukan dan Artileri Rusia, Letnan Jenderal Mikhail Matveyevsky menjelaskan bahwa rudal 9M729 dilengkapi dengan hulu ledak nuklir yang lebih tinggi dan dari pada rudal 9M728 sebelumnya. Mikhail menegaskan bahwa jarak maksimum penerbangan rudal 9M729 adalah 480 km artinya berada pada jarak dibawah maksimum yang dilarang didalam perjanjian INF yakni 500-1.500 km. Serta Mikhail mengungkapkan bahwa bahan bakar yang disuplai oleh rudal menggunakan bahan bakar buatan pabrik yang

mencegah Rusia untuk meningkatkan jangkuan penerbangan maksimum sebagaimana yang diatur didalam perjanjian INF (Kuczyński, 2019).

Rusia secara konsisten mengklaim bahwa tuduhan pelanggaran yang dilayangkan oleh AS adalah tidak benar adanya. Sebaliknya Rusia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kepatuhan AS didalam perjanjian INF menurut pihaknya ada tiga program militer AS yang melanggar ketentuan didalam perjanjian ini diantaranya ialah:

1. *Missile Defense Targets*

AS diketahui telah merancang dan memproduksi banyak rudal target untuk digunakan sebagai uji coba rudal pertahanannya. Rusia mengungkapkan bahwa varian rudal target tersebut di modifikasi dari mesin rudal lama yang dilarang dan dihilangkan dibawah perjanjian INF (Mills, 2019). Salah satu rudal balistik lama milik AS yang dilarang didalam perjanjian ini ialah Minuteman II yang merupakan jenis rudal jarak jauh. Rusia mengklaim bahwa rudal target yang dibuat oleh AS dengan menggunakan mesin Minuteman II telah melanggar perjanjian INF karena rudal tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan rudal jarak menengah sehingga dapat meluncur dengan jarak yang dilarang didalam perjanjian INF (Amy F, 2019).

2. *Armed Drones*

AS memiliki beberapa jenis kendaraan udara tak berawak atau dikenal dengan *drone* yang di operasikan untuk intilijen, pengawasan serta pengintaian. Beberapa jenis *drone* tersebut dirancang untuk memiliki kemampuan untuk menyerang target di darat, diantaranya drone bersenjata tersebut dapat terbang dengan jangkuan 500 sampai dengan 5.500 km. Rusia mengungkapkan bahwa drone bersenjata milik AS telah melanggar perjanjian INF. Hal tersebut disebabkan karena didalam perjanjian INF mendefinisikan rudal jelajah sebagai

kendaraan tak berawak, *self-propelled* yang menopang penerbangan melalui penggunaan pengangkatan pergerakan udara disebagai jalur penerbangannya. Lebih lanjut Rusia juga menjelaskan bahwa rudal jelajah yang diluncurkan dari darat yang dilarang didalam perjanjian INF merupakan rudal jelajah yang memiliki kemampuan sebagai kendaraan pengiriman senjata (Amy F, 2019).

3. *Land-Based Deployment of MK-41 Launchers*

Sebagai bagian dari European Phased Adaptive Approach (EPPA), AS telah mulai mengerahkan *ground land-based Aegis anti-missile* atau dikenal dengan MK-41 di wilayah darat Rumania dan Polandia sebagai bentuk sistem pertahanan rudal NATO diwilayah Eropa. Rusia mengklaim bahwa penggunaan MK-41 ini dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap perjanjian INF. MK-41 ini merupakan jenis peluncur yang sama di gunakan kapal Angkatan Laut AS untuk meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dilaut Tomahawk. Rusia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa MK-41 ini memiliki kemampuan untuk meluncurkan GLCM yang dilarang didalam perjanjian ini serta dapat digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Rusia (Mills, 2019).

Sebelumnya pada 15 Januari 2019 AS dan Rusia melakukan pertemuan di Jenewa Swiss untuk melakukan upaya terakhir mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Menurut laporan pers, diplomat Rusia mengusulkan agar Rusia menampilkan rudal 9M729 dan menjelaskan bahwa rudal tersebut tidak dapat terbang dengan jangkauan yang diatur didalam perjanjian INF, sementara itu sebagai gantinya Amerika Serikat juga harus menunjukkan bahwa peluncur MK-41 di Rumania tidak dapat dikonversikan untuk meluncurkan GLCM. Tetapi AS menolak usulan proposal ini dengan memberikan tanggapan bahwa satu-satunya solusi yang dapat diterima adalah Rusia menghancurkan rudal,

peluncurnya dan infrastruktur pendukungnya. Namun demikian Rusia tetap menampilkan rudal jelajah 9M729 kepada halayak asing dan pers (Amy F, 2019).

Melalui Wakil Menteri Departemen AS, Thomas A. Shanon menyampaikan tanggapannya terkait kekhawatiran Rusia mengenai, MK-41, rudal pertahanan dan Drone milik AS yang dianggap melanggar ketentuan didalam perjanjian INF. Menurut pihaknya bahwa AS telah secara tranparan, substantif dan konstuktif dalam melakukan uji coba rudal dan drone milik mereka. AS tetap mematuhi persyaratan didalam perjanjian tersebut saat melakukan uji coba sistem rudal pertahanan dan memberikan dokumentasi yang diperlukan oleh pihak Rusia. Secara khusus Thomas menjelaskan terkait tanggapan Rusia tentang peluncur MK-41 dengan menggaris bawahi bahwa peluncur tersebut tidak pernah berisi, ataupun di luncurkan untuk meluncurkan rudal yang dilarang didalam perjanjian INF. MK-41 hanya difungsikan sebagai pencegat defensif, dan tidak memiliki kendali senjata dan sistem peluncur yang bersifat ofensif (U.S. Mission Russia, 2017).

Setelah masa tenggang 60 hari sejak pertama AS mengumumkan niatnya untuk menarik diri dari perjanjian INF. 1 Februari 2019 Pemerintah AS mengkonfirmasi keputusan untuk keluar dari kesepakatan INF dan secara resmi tepatnya pada 2 Agustus 2019 AS mengumumkan penarikan diri dari perjanjian INF. Melalui Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyampaikan tanggapan terkait keputusan AS untuk mundur dari perjanjian INF. Menurut AS keputusan diambil karena Rusia dianggap gagal untuk kembali patuh terhadap perjanjian INF dengan menghancurkan atau mengeliminasi rudal 9M729. Ketidapatuhan Rusia terhadap kewajibannya didalam perjanjian tersebut dianggap akan menjadi ancaman bagi negara Amerika Serikat dan negara sekutunya (VOA, 2019).

BAB V

ANALISA KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT MUNDUR DARI PERJANJIAN INTERMEDIATE RANGE NUCLEAR FORCE (INF)

Pada bab sebelumnya telah dibahas bagaimana sejarah awal terbentuknya perjanjian INF serta membahas mengenai dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia dalam perjanjian INF. AS yang sebelumnya menjadi negara yang memiliki peran sentral dalam terbentuknya perjanjian INF kini memutuskan untuk mundur dari implementasi perjanjian INF. Pada bab ini penulis akan menganalisa faktor penyebab keputusan Amerika Serikat mundur dari kesepakatan perjanjian INF dengan menganalisa menggunakan perspektif kepentingan nasional dalam aspek pertahanan.

5.1 Kepentingan Nasional Pertahanan

Keputusan AS untuk mundur dari perjanjian ini ialah bertujuan untuk mengejar kepentingan nasional nya. Pasca berakhirnya masa perang dingin beberapa negara di dunia tertarik untuk mengembangkan senjata nuklir jarak menengah yang dilarang didalam perjanjian INF. Didalam penelitian ini penulis hanya akan berfokus pada pengembangan senjata nuklir jarak menengah milik China yang menjadikan AS merasakan *security dilemma* akibat kapabilitas militer China yang unggul diwilayah Asia Pasifik. Dengan memutuskan keluar dari perjanjian ini akan menjadikan AS mengejar kepentingan hegemoni dari dominasi China dikawasan Asia Pasifik, dengan mengambil langkah untuk meningkatkan kapabilitas nuklir yang sebelumnya dilarang didalam perjanjian ini.

5.1.1 Security Dilema

AS mengungkapkan bahwa alasan utama keluarnya AS dari perjanjian *Intermediate Range Nuclear Force* (INF) ini disebabkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia didalam perjanjian ini. Namun jika di analisa lebih mendalam bahwa faktor motivasi terkuat AS untuk mundur dari perjanjian ini adalah China. AS merasakan dilema keamanan terhadap kapabilitas milersitik China terutama dalam pengembangan senjata nuklir milik China. Sedari awal China bukanlah negara yang terikat didalam perjanjian ini. Tentunya dalam hal ini China mendapatkan keuntungan dalam bidang militer di wilayah Asia Pasifik, karena dapat dengan bebas mengerahkan persenjatan rudal yang lebih kompetitif tanpa adanya keterikatan dengan perjanjian ini. Hal tersebut yang menjadi alasan terkuat bagi AS untuk mundur dari perjanjian INF (Douglas Barrie, 2020). Pada Agustus 2011 Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton yang juga merupakan Peneliti Senior di *American Enterprise Institute*. Mengemukakan pendapatnya terkait pengembangan militer China di Wall Street Journal dengan mengatakan bahwa untuk mencegah penguatan startegis China dikawasan Asia Timur atas rudal jarak menengahnya, maka Perjanjian INF harus dihapuskan atau dengan menekan pihak China untuk menjadi bagian anggota dari perjanjian tersebut (Baek, 2019).

Pada 2010 China telah mulai melakukan penyebaran *anti-ship ballistic missile* dikenal dengan nama DF-21D. Menurut Laksamana Robert F. Willard yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Komando Pasifik AS (PACOM) mengatakan bahwa di tahun yang sama rudal DF-21D telah mencapai kemampuan operasionalnya (Kresier, 2013). Laksamana Samuel J. Locklear III yang juga merupakan pimpinan Komando Pasifik AS menerangkan bahwa penyebaran rudal yang dilakukan oleh China ini diyakini telah dirancang untuk untuk

menargetkan kapal induk milik AS. Rudal yang dimiliki China tersebut memiliki julukan yakni “*the carrier-killer*” yang mempunyai jangkauan 1.800-3.000 kilometer karenanya senjata tersebut merupakan senjata yang paling dianggap mengancam bagi keamanan AS (Baek, 2019). Diketahui China memiliki setidaknya tiga satelit pengintai yang mengorbit di atas wilayah Pasifik dengan SAR atau sensor optik yang dapat digunakan untuk menetapkan posisi kapal induk musuh secara lebih akurat (Kresier, 2013).

Missile type	PLA service designation	Western designation	Estimated maximum range (km)	Estimated number of launchers	Notes
Intercontinental ballistic missile (ICBM)	DF-4	CH-SS-3	5,500	10	Nuclear; roll-out to launch
	DF-5A	CH-SS-4 mod 2	13,000	20	Nuclear; silo-based
	DF-5B	CH-SS-4 mod 3	13,000?		Nuclear; silo-based; MIRV** capable
	DF-31	CH-SS-10 mod 1	7,200	8	Nuclear; road-mobile
	DF-31A	CH-SS-10 mod 2	11,200	24	Nuclear; road-mobile
	DF-31A(G)	CH-SS-10 mod 3?	11,200+	18	Nuclear; road-mobile; MIRV capable
	DF-41*	CH-SS-20	15,000?	18	Nuclear; road-mobile; MIRV capable
Intermediate-range ballistic missile (IRBM)	DF-26	n.k.	3,500+	72	Nuclear, conventional and anti-ship variants; road-mobile
Medium-range ballistic missile (MRBM)	DF-16	CH-SS-11 mod 1	1,000	24	Conventional
	DF-16A/(G)?	CH-SS-11 mod 2	1,000		Conventional
	DF-17*	CH-SS-22?	2,000?	18	Conventional with hypersonic glide vehicle
	DF-21A	CH-SS-5 mod 2	1,750	80	Nuclear
	DF-21A(G)/E?	CH-SS-5 mod 6	1,750?		Nuclear
	DF-21C	CH-SS-5 mod 4	1,500	24	Conventional
	DF-21D	CH-SS-5 mod 5	1,500	30	Anti-ship
Short-range ballistic missile (SRBM)	DF-11A	CH-SS-7 mod 2	600	108	Conventional
	DF-15B	CH-SS-6 mod 3	725+	81	Conventional
Ground-launched cruise missile (GLCM)	CJ-10	n.k.	1,500+	54	Conventional
	CJ-10A	n.k.	1,500+		Conventional
	CJ-100*	n.k.	1,000	16	Conventional

Gambar 5.1 Daftar Perkiraan Jumlah Senjata Rudal milik China

(Sumber: *The End of The INF treaty: Implications For Asia* [4,p.66])

China memiliki kekuatan rudal terbesar dan paling beragam didunia diperkirakan jumlah rudal balistik dan rudal jelajah yang dimiliki oleh China mencapai 2000 dan 95% dari jumlah rudal tersebut merupakan rudal yang memiliki jangkauan yang dilarang didalam perjanjian INF. Pengembangan militer yang dilakukan oleh China adalah bertujuan untuk

menghalangi dan mengalahkan AS dalam konflik regional (Picardo, 2019). Kemampuan Rudal yang dimiliki oleh China menjadi ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik terutama di kawasan Laut China Selatan yang dikenal merupakan zona konflik perebutan klaim wilayah oleh beberapa negara yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan. China telah melakukan tindakan militerisasi di wilayah perairan sengketa Laut China Selatan dan mengancam alusista kapal pesawat milik AS dan sekutu yang beroperasi di wilayah tersebut (Cuomo, 2018).



Gambar 5.2 DF-17 milik China ditampilkan dipublik saat pergelaran parade militer di Beijing 1 Oktober 2019

(Sumber: www.defensenews.com [55,p.71])

Selama dua dekade terakhir, China telah berinvestasi secara besar-besaran untuk peningkatan kapabilitas rudal berbasis darat miliknya. China telah menerapkan sistem *Anti-Access/Area-Denial* (A2/AD) di wilayah regionalnya. A2/AD merupakan upaya menolak pergerakan militer musuh di medan area konflik/perang dengan mengerahkan pesawat tempur, kapal tempur, dan rudal balistik jelajah yang khusus dirancang untuk menyerang target sasaran

musuh sehingga musuh tidak mendapatkan kendali di area tersebut (MDAA, 2018). Sistem ini difokuskan untuk menyaingi kemampuan militer AS di Pasifik Barat terutama pangkalan udara militer milik AS di kawasan Jepang dan Guam serta penempatan akses militer AS di wilayah Filipina dan Australia. Mengingat pentingnya kekuatan kekuatan udara dalam strategi pertahanan AS menjadikan China mencari segala cara untuk menyaingi kemampuan AS dibidang ini (Heginbotham, 2015). China memiliki gudang persediaan senjata nuklir berbasis darat dan rudal jarak menengah yang dilarang didalam perjanjian INF yang dapat mengancam pangkalan militer AS di Pasifik Barat (Cuomo, 2018).



Gambar 5.3 Pangkalan Udara Militer Udara Milik AS di Guam *Andersen Air Force Base*

(Sumber: *The End of The INF treaty: Implications For Asia* [4,p.66])

Pangkalan Udara milik AS yang terletak di Guam diperkirakan berada pada jarak 3.000 km dari garis pantai China, dan jarak minimum yang dibutuhkan untuk menyerang

pangkalan tersebut adalah sekitar 4.000 km termasuk dalam jangkauan rudal balistik Jarak menengah milik China DF-26 (Douglas Barrie, 2020). Kemudian pada tahun 2017, Thomas Shugart dan Javier Gonzalez yang merupakan Angkatan Laut AS ditugaskan di *Center for a New American Security* untuk melakukan simulasi terkait potensi kehancuran kekuatan proyeksi pangkalan militer milik AS di kawasan Asia Pasifik. Hasil dari simulasi menunjukkan prediksi yang mengkhawatirkan bahwa pangkalan militer milik AS yang berada di Jepang dapat diserang, karena penggunaan senjata nuklir milik China yang dinilai dapat menjangkau pangkalan militer milik AS di kawasan tersebut (Cuamo, 2018). Hal tersebut menjadikan AS merasakan *security dilemma* akibat dari penggunaan kapabilitas rudal jarak menengah milik China yang tidak tergabung didalam perjanjian INF

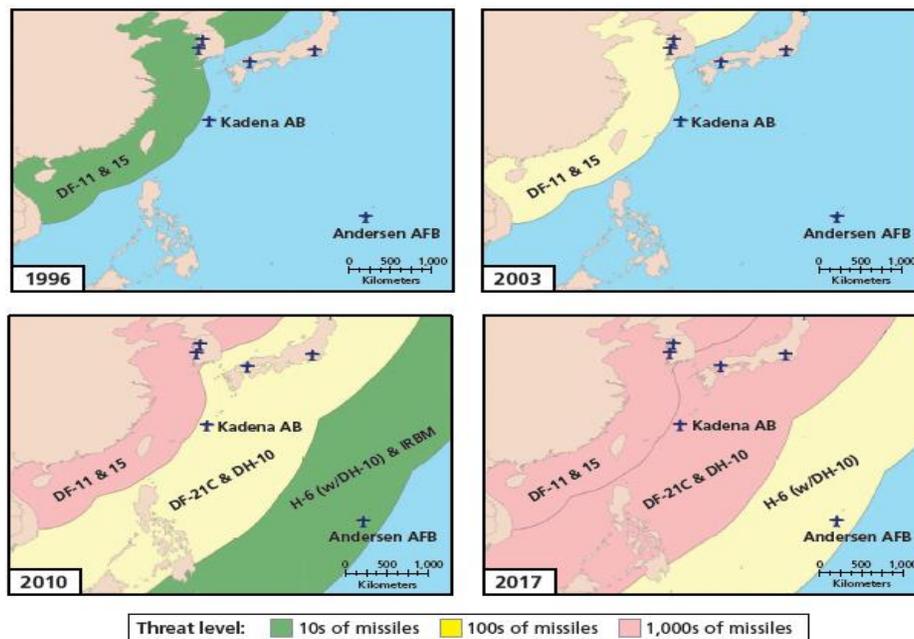


Gambar 5.4 Rudal DF-26 ditampilkan dalam acara parade militer di Tiananmen Square

(Sumber: www.defensenews.com [56,p.71])

Dilema keamanan yang di rasakan oleh AS terkait pengembangan Rudal milik China juga telah disampaikan secara langsung oleh Duta Besar AS untuk Republik Korea Utara

Harry Haris pada April 2017. Pihaknya menyampaikan bahwa sejak tahun 2010 China telah memperkuat kemampuan rudal jarak menengahnya dengan menerapkan sistem *Anti-Access Area-Denial* (A2/AD) yang digunakan untuk memblokir akses militer AS ke Laut China Selatan. Diketahui bahwa China memiliki senjata rudal jarak menengah diantaranya DF-11 dengan jarak luncur 600 km, DF-15 dengan jarak luncur 800 km, DF-16 dengan jarak luncur 1.500km, DF-21 dengan jarak luncur 1.700 km, DF-25 dengan jarak luncur 4000 km dan rudal jelajah yang bernama CJ-10 memiliki kekuatan tempuh 2.500 km (Baek, 2019). Bahkan sebelum Presiden Donald Trump menyampaikan niatnya untuk mundur dari perjanjian INF pada Oktober 2018 para petinggi militer AS secara terbuka menyampaikan kekhawatirannya atas ancaman yang ditimbulkan dari China (Cuomo, 2018).



Gambar 5.5 Peta Kisaran Perkembangan Jumlah Rudal China dari 1996-2017

(Sumber: *The U.S.-China Military Scorecard* [11,p.66])

Jika dilihat dari peta gambaran rudal China dari tahun 1996 sampai dengan 2017 terlihat perkembangan yang cukup signifikan terkait pengembangan nuklir milik China. Hal ini lah yang menjadi alasan terkuat AS memutuskan untuk mundur dari perjanjian ini. Walaupun secara justifikasi alasan keluarnya AS dari perjanjian ini disebabkan karena tindakan ketidakpatuhan Rusia didalam perjanjian ini, tetapi faktor terkuat yang membuat AS mengambil keputusan untuk mundur dari perjanjian ini ialah untuk mencegah China memperluas pengaruhnya di Asia Timur. Ditambah lagi persaingan strategis antara AS dan China di kawasan Asia Pasifik menimbulkan kekhawatiran dilema keamanan bagi AS jika terus berada didalam perjanjian tersebut.

Keterikatan Amerika Serikat pada perjanjian INF menyebabkan AS tidak dapat menguji serta mengerahkan rudal jelajah dan balistik di darat yang dapat digunakan sebagai strategi untuk melawan peningkatan kemampuan rudal jarak menengah China. Penarikan AS dari perjanjian INF akan dimainkan sebagai kartu untuk memberikan tekanan strategis pada China. Hal tersebut diperkuat lagi dengan statment yang disampaikan oleh mantan kordinator gedung putih *Arms Control and Weapons of Mass Destruction* (WMD) Gary Samore menyatakan bahwa salah satu alasan penarikan Amerika Serikat dari perjanjian INF adalah karena China tidak termasuk kedalam perjanjian ini (Baek, 2019) .

Walaupun secara resmi alasan AS menarik diri dari perjanjian INF adalah karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia tetapi AS memiliki kepentingan untuk mengejar strategi yang lebih kompetitif dengan China. Pada 2019 didalam pidato kenegaraan Presiden Donald Trump seolah mengisyaratkan penarikan dirinya atas perjanjian tersebut salah satunya penyebabnya adalah karena China, Trump menyampaikan bahwa pihaknya

mungkin dapat membuat perjanjian nuklir yang baru yang lebih relevan dengan menambahkan China dan negara lainnya kedalam perjanjian tersebut (Lanoszka, Alexander, 2019).

5.1.2 Hegemoni AS

Keputusan AS untuk mundur dari perjanjian ini juga dinilai sebagai salah satu strategi AS dalam mencapai kepentingan hegemoni. Hegemoni merupakan situasi dimana tidak ada negara lain yang dapat mendominasi atau mengimbangi kemampuan pertahanan militer dan ekonomi dari suatu negara (Schmidt, 2018). Sikap AS untuk mundur dari perjanjian ini memiliki tujuan mengejar hegemoni dalam bidang pengembangan misil. AS menilai jika pihaknya terus berada didalam perjanjian ini akan berdampak secara langsung yang menyebabkan hambatan bagi negaranya untuk mencapai tujuan tersebut (Marga R, Adi Putra S, Penny Kurnia P., 2020).

China sejak awal bukanlah negara yang tergabung didalam perjanjian INF. Seiring berjalannya waktu peningkatan kapabilitas militer China terutama dalam aspek pengembangan nuklir membuat AS merasakan *security dilemma*. Saat ini China berusaha untuk mendominasi kekuatannya di wilayah Asia Pasifik. Didalam *Beijing's defense white papers* adanya indikasi yang menjelaskan bahwa modernisasi teknologi militer China didesain untuk menangkal konfrontasi dengan AS. Peningkatan kapabilitas militer China saat ini difokuskan pada pengembangan kekuatan angkatan laut yang didukung dengan persenjataan rudal miliknya (Prasetya, 2012). *Blue water capability* merupakan strategi yang dijalankan oleh China saat ini. Strategi ini merupakan strategi dengan memperlihatkan kapabilitas kekuatan laut miliknya dan keberadaan pasukan militernya di wilayah Pasifik Barat dan Samudera Hindia dalam jangka waktu yang lama (Planifolia, 2017).

Selama dua dekade ini China yang memiliki pertumbuhan ekonomi diikuti dengan perkembangan militer yang sangat pesat. Keunggulan yang dimiliki China dalam pertumbuhan Ekonomi menjadi China melakukan investasi secara besar-besaran untuk pengembangan militernya yang seiring bertambahnya waktu dinilai dapat menyaingi hegemoni AS. Dominasi China di kawasan Asia Pasifik seolah menjadi kekhawatiran bagi AS. Militer China yang dikenal dengan *People's Liberation Army* (PLA) baru-baru ini telah mengerahkan pasukannya untuk menduduki perairan di wilayah sengketa Laut China Selatan dengan mengancam alusista milik AS yang sedang beroperasi di wilayah tersebut. PLA tersebut didukung dengan kekuatan rudal darat yang bersenjata konvensional terbaik di dunia. China mengerahkan rudal jelajah anti-kapal supersonik YJ-12 di Pulau Spratly. Kepatuhan AS dengan perjanjian INF menjadikan AS mengalami keterbatasan untuk melakukan perlawanan dari tindakan yang dilakukan China (Cuomo, Scott A., 2018).



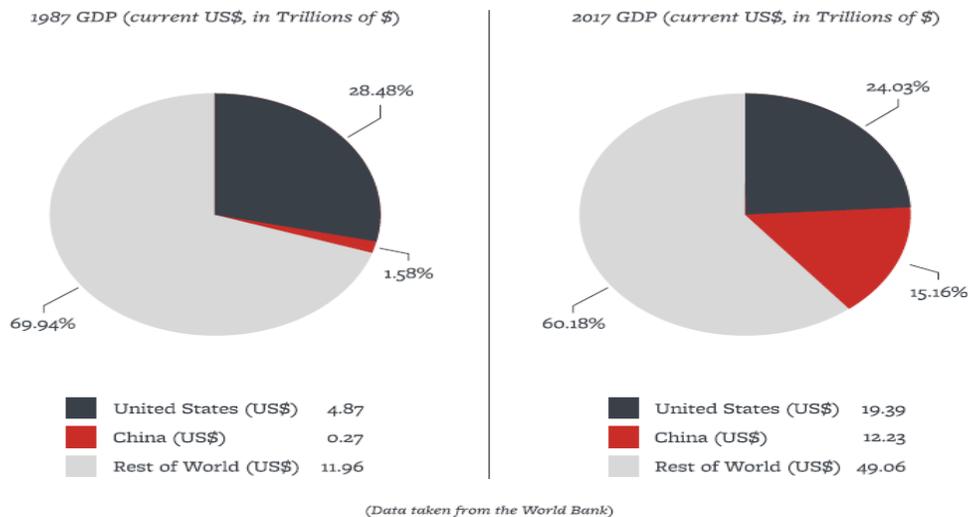
Gambar 5.6 PLA menduduki perairan Laut China Selatan didekat *Spartly Island*
(Sumber: diambil dari *website* BBC News Indonesia [44,p.69])

Wilayah Laut China Selatan akhir-akhir ini kembali memanas setelah aksi militer yang dilakukan oleh PLA hal tersebut lantas mengundang reaksi dari dunia internasional terutama AS (Kurniadi, 2020). Stabilitas di kawasan Laut China Selatan menjadi masalah serius bagi AS, selain Laut China Selatan menjadi rute jalur perairan internasional, AS juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk menunjang kepentingan nasionalnya AS memiliki keterikatan kerja sama perdagangan internasional dengan negara-negara di kawasan tersebut selain itu untuk mendukung mobilitas pasukan militernya serta dominasinya secara global (Melita A.B, 2018). Menurut Departemen Pertahanan AS, saat ini China berusaha memperoleh dominasinya di wilayah regional Asia Pasifik, melalui upaya peningkatan kapabilitas militernya yang dapat menjadi ancaman bagi kepentingan AS. Meskipun China belum menjadi kekuatan militer global, namun langkah strategi yang diambil oleh China mulai ingin menyaingi kemampuan militer AS terutama di wilayah regionalnya (Bendini, 2016).

Saat ini China sedang fokus pada strategi “*active defense*” dengan menerapkan sistem A2/AD yang berfokus pada perlunya mempertahankan wilayahnya jika terjadi serangan dengan melakukan serangan balasan. Saat ini strategi tersebut dijalankan pada klaim wilayah teritorial perairan Laut China Selatan dengan mengembangkan kapabilitas militer miliknya untuk memastikan keamanan perairan yang diklaimnya. Pengembangan dan kekuatan militer saat ini lebih menekankan pada modernisasi kekuatan rudal jarak pendeknya (Bendini, 2016). China telah muncul sebagai kekuatan regional baru di kawasan Asia Pasifik dengan kemampuan sistem A2/AD yang kuat dengan mengerahkan rudal balistik dan jelajah canggih dibarengi dengan sistem pertahanan udara miliknya yang bertujuan untuk mengalangi militer AS untuk beroperasi di wilayah tersebut. A2/AD China berkonsentrasi pada sekitar wilayah Taiwan dan Laut Chins Selatan. Untuk menerapkan sistem A2/AD ini China mengandalkan

rudal balistik dan jelajah darat yang canggih miliknya untuk mengancam beberapa fasilitas pangkalan militer AS di terutama di wilayah Jepang dan Guam (MDAA, 2018).

Untuk menangkal ancaman yang datang dari China yang ditimbulkan oleh kemampuan sistem A2/AD miliknya, maka pasukan militer AS harus mampu mendominasi kembali kekuatannya di wilayah tempat penyebaran sistem A2/AD terutama di wilayah Laut China Selatan yang saat ini masih menjadi *hotspot* konflik. Dengan mampu mencegah, mempertahankan dan mengalahkan negara yang berpotensi menjadi lawan yakni China. Untuk mampu menangkal sistem A2/AD China, maka AS harus menekankan peningkatan kerjasama pasukan bersama di wilayah yang diperebutkan, serta AS harus meningkatkan teknologi pertahanan udara dan rudal yang lebih unggul dan hemat biaya untuk pertahanan regional dan untuk melindungi aset militernya seperti pangkalan udara miliknya (MDAA, 2018).



Gambar 5.7 Perbandingan pertumbuhan GDP US & China dari 1987 sampai 2017

(Sumber: Jurnal *Texas National Security Review* [22,p.67])

Jika dilihat pada gambar 5.5 perbandingan pertumbuhan GDP China dari 1987 jauh mengalami peningkatan, menjadikan China sebagai peringkat nomor dua dunia dalam pertumbuhan ekonomi. China saat ini menduduki posisi nomor dua dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia setelah AS, diikuti dengan kekuatan militer miliknya menjadikan China sebagai negara *emerging power* terbesar di kawasan Asia Pasifik (Planifolia, 2017). Peningkatan pengaruh China di kawasan Asia Pasifik diikuti dengan kemajuan pertumbuhan kekuatan ekonomi yang cukup pesat menyebabkan upaya strategi *rebalancing* AS semakin sulit, meningkatnya perekonomian China memberikan tantangan tersendiri bagi AS. Kepentingan China pada dasarnya selalu bersifat konfrontatif dengan kepentingan AS hal ini disebabkan karena kepentingan nasional utama bagi China adalah klaim perairan Laut China Selatan yang secara langsung bertentangan dengan batas-batas negara aliansi AS (Syahrin, 2018).

Pasca 2011 kebijakan luar negeri AS mulai berfokus pada peningkatan dan pengembangan peran AS di kawasan Asia Pasifik terutama dibagian selatan. AS mendominasi dengan banyaknya jumlah aliansi di kawasan Asia Pasifik namun seiring waktu menguatnya perkembangan China di bidang ekonomi dan militer menjadikan AS merasa dominasi atas Kawasan Asia berkurang (Planifolia, 2017). Asia Pasifik dianggap sangat penting bagi AS lebih dari 50% populasi dunia berada di kawasan ini, beberapa diantaranya merupakan negara dengan kekuatan militer besar di dunia. Lima negara di kawasan ini memiliki perjanjian keamanan dan merupakan aliansi AS diantaranya yakni Australia, Korea Selatan, Thailand, Filipina dan Jepang. Selain itu juga AS melihat kawasan ini sangat berpengaruh terhadap keamanan wilayahnya, karena Asia Pasifik berbatasan langsung dengan Pantai Timur AS (Planifolia, 2017).

Bagi AS meningkatnya kekuatan dan pengaruh China di wilayah perairan Laut China Selatan menjadi ancaman serius dan akan melahirkan ketakutan serta ketidakstabilan serta dapat menyulut konflik yang menjadi bagian pengembangan strategi AS di kawasan Asia Pasifik. Dengan meningkatkan hubungan keamanan dengan negara sekutu AS secara terang-terangan ingin menunjukkan kepentingannya di Laut China Selatan (Melita A.B, 2018). Dominasi yang terus dilakukan oleh China di kawasan Asia Pasifik menjadi perhatian utama bagi AS yang dalam strateginya dikenal dengan *Asia's Balancing*. Hal ini turut disampaikan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri AS pada saat itu Hillary Clinton dalam pidatonya, Hillary menyampaikan bahwa masa depan AS sangat berhubungan dengan Asia Pasifik dan masa depan kawasan sangat bergantung kepada peran AS. Dengan demikian AS harus memperkuat kehadirannya di Asia Pasifik terutama dalam kekuatan maritim (Emmers, 2014).

32 tahun lamanya sejak berlakunya perjanjian nuklir jarak menengah INF antara Rusia dan AS menjadikan sebuah keuntungan bagi China untuk mengembangkan kapabilitas nuklir jelajah dan peluncur jarak darat miliknya tidak ada larangan bagi pihak China untuk mengembangkan ataupun meluncurkannya, karena negaranya bukanlah penandatangan perjanjian ini. Namun karena hal tersebut juga China dianggap telah memanfaatkan kondisi kepatuhan AS terhadap perjanjian INF, dengan mengerahkan ribuan balistik jelajah miliknya yang diluncurkan dari darat yang membahayakan pangkalan militer AS di Asia Pasifik Barat (Cuamo, 2018).

Keputusan yang diambil oleh AS untuk mundur dari perjanjian INF dinilai sebagai keputusan yang rasional. Didalam buku putih strategi keamanan nasional milik AS menjelaskan bahwa AS akan mengedepankan pertahanan militernya dengan menerapkan

strategi *Deterrence* bertujuan mencegah dan mengalahkan lawannya dengan mendorong hubungan pertahanan dengan sekutu dan mitranya (Cuomo, Scott A., 2018). Mundur AS dari perjanjian tersebut akan dimanfaatkan oleh AS untuk mempertahankan hegemoninya di wilayah Asia Pasifik dan mencegah perilaku agresif China. AS akan mengembangkan kembali rudal yang sebelumnya dilarang di dalam perjanjian ini sebagai langkah untuk menerapkan strategi *deterrence* terhadap China. Selain itu juga strategi yang dijalankan AS bertujuan untuk mempersempit ruang gerak China untuk mendominasi Kawasan Asia Pasifik.

5.1.3 Peningkatan Kapabilitas Militer AS

Di era globalisasi saat ini, negara-negara didunia disibukkan dengan kompetisi oleh para aktor negara dalam memaksimalkan kekuatan militernya, keunggulan kapabilitas militer suatu negara dapat menentukan posisinya ketika berhadapan dengan kekuatan militer negara lain. Sehingga sebuah kewajiban bagi suatu negara untuk meningkatkan kapabilitas teknologi militernya sebagai salah satu tujuan untuk mencapai kepentingan pertahanan suatu negara (Satris, Rezki, 2015). Salah satu alasan utama AS menarik diri dari perjanjian INF adalah untuk mencegah tindakan agresif dari China dengan mengimbangi kapabilitas persenjataan misil miliknya.

Dengan keputusan AS keluar dari perjanjian ini maka tidak ada lagi yang dapat menghalangi AS untuk mengembangkan dan mengoperasikan senjata rudal jarak menengah yang sebelumnya dilarang didalam perjanjian ini. Pada bulan April 2017 Harry Harris Komandan U.S *Pacific Command* (PACOM) mengemukakan pendapatnya didepan Senat AS bahwa ketentuan didalam perjanjian INF saat ini telah membatasi kemampuan AS untuk melawan rudal jelajah China dan negara lain. Harris juga mengatakan bahwa China

berinvestasi secara besar-besaran dalam pengembangan senjata nuklir miliknya sehingga AS juga harus mampu dalam meningkatkan kemampuannya untuk mengejar kepentingan nasional pertahanan. Menurutnya Perjanjian INF harus dinegosiasikan kembali karena perjanjian dianggap hanya menjadi batasan secara sepihak bagi AS (Eckstein, 2017).

Senjata rudal jarak darat yang dilarang didalam perjanjian ini jauh lebih murah untuk dikembangkan dibandingkan senjata rudal berbasis laut dan udara, sejauh ini perjanjian INF telah menguntungkan China dalam pengembangan senjata rudal berbasis darat secara bebas dan memberikan batasan bagi AS untuk mengembangkan serta mengoperasikan senjata rudal berbasis darat, AS hanya bergantung pada senjata rudal berbasis laut dan udara. Hal ini menjadikan para pejabat AS berpendapat bahwa dampak status quo perjanjian INF untuk kepentingan keamanan AS di Pasifik Barat tidak lagi dapat dipertahankan (Cuomo, Scott A., 2018).

Setelah AS secara resmi keluar dari perjanjian INF pada Agustus 2019 AS mengumumkan bahwa pihaknya akan mengembangkan kembali senjata rudal jelajah darat (GLCM) yang sebelumnya dilarang didalam perjanjian ini. AS menilai bahwa beberapa tahun yang akan datang pihaknya akan memiliki kapabilitas rudal yang lebih unggul dari sebelumnya yang dapat digunakan sebagai strategi untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan dan aliansinya, AS mengambil keputusan untuk mengembangkan senjata nuklir GLCM ini bertujuan untuk menghindari ancaman yang datang dari pengembangan senjata rudal milik negara lain yang tidak tergabung didalam perjanjian INF yakni China (Marga R P.S, 2019).

Tabel 5.1. Proyeksi Anggaran Senjata Rudal AS

CBO' Budget Projection for	2014-2023	2015-2024	2017-2026	2019-2028
Strategic nuclear delivery system and weapons	\$136 billion	\$160 billion	\$189 billion	\$234 billion
Tactical nuclear delivery system and weapons		\$8 billion	\$9 billion	\$15billion
DOE's nuclear weapons labs and supporting activities	\$105 billion	\$70 billion	\$87 billion	\$106 billion
DOD's command, control, communication and early warning sytem	\$56 billion	\$52billion	\$58billion	\$77 billion
Additional cost	\$59 billion	\$49 billion	\$57 billion	\$62 billion
Total	\$355 billion	\$348 billion	\$400 billion	\$494 billion

(Sumber: diambil dari Forum Kajian Pertahanan Maritim dalam *website* www.fkpmar.org dikutip oleh Sugihartini [65,p.72])

Jika dilihat dari tabel proyeksi anggaran senjata rudal AS terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun bahkan anggaran 2017 ke 2019 hampir mengalami kenaikan sebanyak 100 juta Dolar Amerika. Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa dorongan AS untuk mengembangkan senjata rudal miliknya sangatlah tinggi. Senjata rudal milik AS masih menjadi peranan kunci dalam taktik strategi kepentingan pertahanan negaranya yakni untuk mencegah (*deter*) negara lain melakukan tindakan *preemptive strike* serta digunakan untuk menjaga hegemoni negaranya (Sugihartini, 2019). Langkah yang diambil AS

untuk menyingkal perjanjian ini adalah untuk berfokus untuk persaingannya dengan China di kawasan Asia Pasifik. China yang telah membangun gudang senjata konvensional serta menerapkan sistem *anti-access/area-denial* (A2/AD). Semua senjata rudal yang dimiliki China 95% merupakan senjata kelas rudal jarak menengah yang dilarang didalam perjanjian INF. Hal ini menyebabkan AS terjebak dalam *security dilemma* terutama dalam sistem militer miliknya yang dirancang untuk mengontrol laut pasifik barat. Jika terjadi *high-end conflict* didalam hal ini pihak militer angkatan laut AS yang akan mengalami kerugian karena keterbatasan kapabilitas rudal yang dimilikinya (Levine, 2018).

Penarikan AS dari perjanjian ini akan dapat membantu membalikan situasi dilema yang dirasakan AS terhadap kapabilitas militer China. Sistem rudal konvensional milik AS akan dimulai dengan versi Tomahawk yang akan diluncurkan dari darat dan akan merancang skenario sistem rudal balistik GLCM yang mirip dengan DF-21 dan DF-26 yang dapat ditempatkan pada daerah yang tidak dapat tenggelaman seperti wilayah Jepang bagian utara, Guam, Filipina bagian selatan atau Australia bagian utara. Senjata rudal tersebut akan berpotensi sebagai strategi pertahanan alternatif AS untuk wilayah Pasifik Barat (Levine, 2018).

Strategi yang digunakan dalam penempatan rudal balistik GLCM yakni menggunakan sistem A2/AD yang dimiliki Amerika yang digunakan untuk mengunci perairan di wilayah *first island chain* atau yang dikenal dengan rantai pulau pertama terdiri dari wilayah Taiwan, Okinawa, dan Filipina yang dianggap oleh China sebagai wilayah pertahanan pertama. Strategi tersebut disebut sebagai “*Archipelagic Defense*” yang dikemukakan oleh Andrew Krepinevich yang menjabat sebagai analisis senior kebijakan pertahanan AS di *Center for*

Strategic and Budgetary Assessments (Levine, 2018). Strategi ini dianggap mampu menghalangi serta menahan agresi militer China dikawasan perairan Pasifik Barat tanpa harus menempatkan kapal AS, selain itu juga strategi tersebut dianggap berpotensi lebih murah dibandingkan menempatkan militer kapal tempur induk yang memakan biaya lebih mahal untuk mempertahankan kendali wilayah laut (Levine, 2018).

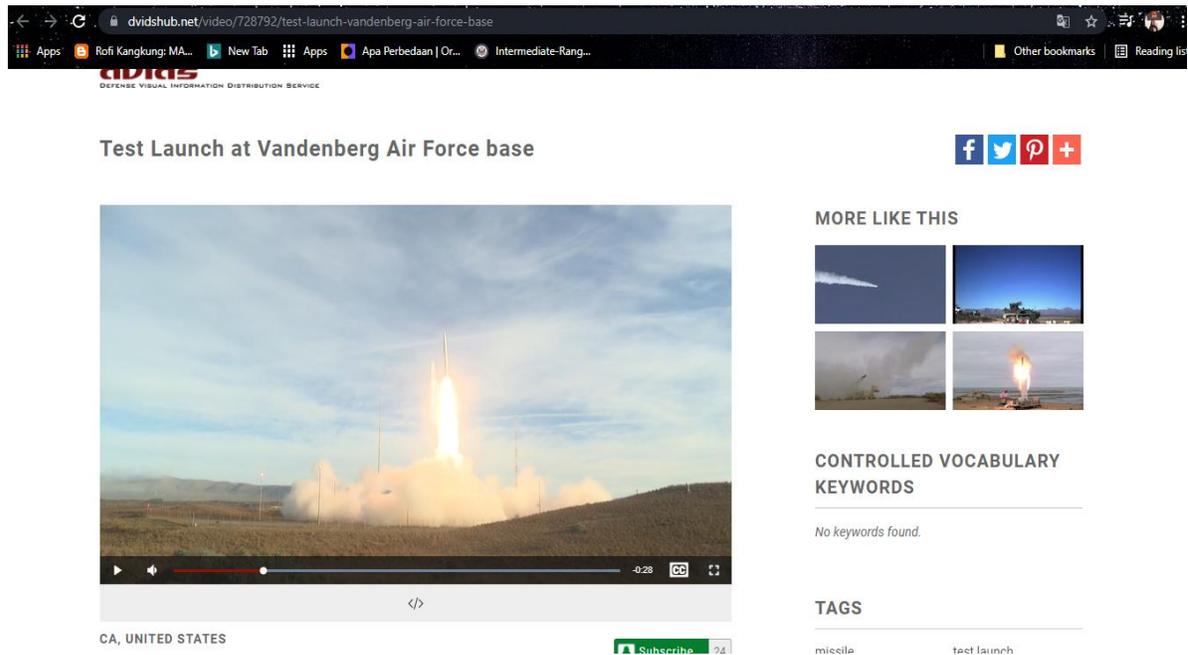


Gambar 5.8 Uji Coba GLCM milik AS yang dikenal sebagai MK41 di Pulau San Nicolas, California

(Sumber: *Radio Free Europe Radio Liberty* dalam *website* www.rferl.org [63,p.72])

Setelah dua minggu penarikan diri AS dari perjanjian INF. Pada 18 Agustus AS menguji coba rudal jelajah berbasis darat (GLCM) disebut MK41 yang memiliki jangkauan lebih dari 500 km. Uji coba tersebut dilakukan pada hari Minggu pukul 14.30 di Pulau San Nicolas, California (Xinhua, 2019). Departemen Luar Negeri AS merilis sebuah pernyataan bahwa selama uji coba tersebut pihaknya mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai informasi kedepan untuk pengembangan lebih lanjut terkait rudal jarak menengah miliknya.

Menurutnya AS telah memiliki rudal jelajah yang diluncurkan dari laut dan udara sehingga dalam pengembangan versi peluncuran darat merupakan proses yang cukup mudah dilakukan (Martin, 2019).



Gambar 5.9 Video Uji Coba Kedua Rudal Tomahawk GLCM milik AS di Vandenberg, California

(Sumber: video diambil oleh Michael Stonecypher dalam website www.dvidshub.net [50,p.71])

Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2019 AS melakukan uji coba kedua rudal jelajah darat GLCM miliknya, uji coba tersebut dilakukan di Pangkalan militer Vandenberg, California. Rudal tersebut memiliki kemampuan jangkauan lebih dari 500 km yang sebelumnya dilarang didalam ketentuan perjanjian INF. Dalam menanggapi uji coba tersebut pihak AS menyampaikan bahwa mereka akan melakukan evaluasi terkait uji coba kedua yang telah mereka lakukan (Reuters, 2019). Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengumumkan bahwa setelah AS selesai mengembangkan sistem rudal yang sebelumnya dilarang didalam perjanjian

INF untuk langkah selanjutnya AS akan berkonsultasi dengan negara sekutunya terkait letak penyebaran rudal tersebut (Kingston Reif, 2020).

Sebelumnya pada bulan Maret 2019 AS telah menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengembangkan tiga jenis rudal yang diluncurkan didarat dua diantaranya merupakan rudal balistik GLCM, AS telah menyiapkan anggaran sekitar 96 Juta US Dollar terkait pengembangan senjata rudal tersebut. Pejabat Departemen Pertahanan AS mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan rudal balistik yang diluncurkan dari darat dengan jangkuan 3.000 hingga 4.000 km dan diperkirakan rudal tersebut setidaknya akan siap dalam jangka waktu lima tahun (Reif, 2020). RUU alokasi anggaran pertahanan tahun 2020 telah disetujui oleh Kongres AS pada bulan Desember namun didalam ketentuannya melarang penggunaan dana tersebut untuk penyebaran rudal yang sebelumnya dilarang didalam perjanjian ini, akan tetapi tidak melarang dalam pengembangan serta pengujiannya (Kingston Reif, 2020).

Senjata rudal yang diluncurkan dari darat lainnya sedang dalam target pengembangan oleh Angkatan Darat AS jangkuan rudal tersebut diperkirakan akan melebihi 500 km termasuk didalamnya yakni *long-range hypersonic weapon* dan *the strategic long-range cannon*. Permintaan anggaran pada 2021 untuk pengembangan senjata mengalami peningkatan secara besar-besaran yakni hampir \$400 Juta diatas permintaan anggaran pertahanan sebelumnya pada 2020. (Reif, 2020) Selain itu, AS telah mempercepat penyebaran sistem pertahanan rudal MK-41 di Rumania dan Polandia, rudal tersebut sebelumnya merupakan rudal yang di umumkan oleh Rusia telah melanggar perjanjian INF (Minghao, 2018).

Rusia bereaksi negatif terkait uji coba rudal balistik AS menurut juru bicara Rusia Kremlin Dmitry Peskov pada 13 Desember mengatakan bahwa lebih dari sekali Amerika

Serikat telah membuat persiapan untuk melanggar perjanjian INF, uji coba yang dilakukan oleh AS menegaskan bahwa perjanjian tersebut hancur atas inisiatif AS. Rusia juga mengklaim bahwa uji coba itu juga membuktikan tuduhannya bahwa AS melanggar Perjanjian INF di masa lalu dengan menggunakan rudal yang memiliki karakteristik mirip rudal yang dilarang didalam perjanjian ini. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov juga mengatakan pada 26 Desember bahwa uji coba tersebut memberikan bukti nyata dari apa yang telah kita bicarakan selama bertahun-tahun terkait pelanggaran AS terhadap perjanjian INF (Kingston Reif, 2020).

Sementara itu China juga menanggapi uji coba yang dilakukan oleh AS juru bicara kementerian luar negeri China Geng Shuang merilis pernyataannya dalam *Agence France Presse* melaporkan bahwa pihaknya menyampaikan keprihatinan atas tindakan yang dilakukan oleh AS ini akan memicu babak baru didalam perlombaan senjata nuklir yang akan mengarah pada konfrontasi militer, tindakan tersebut akan berujung pada dampak yang cukup negatif terkait situasi keamanan internasional dan juga regional. Kemudian menurut China penarikan AS dari perjanjian ini merupakan keputusan yang sudah direncanakan dari lama, tujuan sebenarnya penarikan ini ialah untuk membebaskan dirinya dari keterikatan terhadap perjanjian INF sehingga dapat mengembangkan rudal yang unggul dan mencari keuntungan militer sepihak untuk melawan kebangkitan China (Martin, 2019).

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Perjanjian Intermediate Range Nuclear merupakan perjanjian antara AS dan Uni Soviet yang mengatur pengendalian senjata nuklir jarak menengah (GLCM) yang memiliki jangkauan 500-5.500 km. Perjanjian ini merupakan tonggak penting dalam hubungan AS dan Rusia serta perjanjian ini juga telah berhasil meredam konflik pada masa era perang dingin senjata nuklir antara kedua negara adidaya. Perjanjian ini melemah seiring berjalannya waktu pasca Uni Soviet mengalami perpecahan wilayah, Rusia menjadi aktor penting didalam meneruskan perjanjian ini. pada akhir 2000-an Rusia mengungkapkan kekhawatirannya terkait perjanjian ini karena diketahui beberapa negara tidak turut serta didalam perjanjian ini diantaranya China.

Pada 2017 AS melayangkan tuduhan terhadap Rusia terkait kepatuhan terhadap perjanjian ini. AS meminta SVC untuk mengidentifikasi sistem 9M729. Kemudian pihaknya meminta Rusia untuk kembali patuh kedalam perjanjian ini. Namun Rusia membantah secara tegas tuduhan yang dilakukan oleh AS dengan melakukan pameran senjata rudalnya di publik dan mengeluarkan statment dengan menyatakan bahwa rudal 9M729 hanya memiliki jangkauan 480 km yang artinya tidak melebihi batas yang ditentukan didalam perjanjian ini. Sebaliknya Rusia menuduh bahwa AS lah yang telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini terdapat 3 program militer yang di indikasi telah melanggar perjanjian ini diantaranya, *Missile Defense Targets*, *Armed Drones* dan *MK-41 Launchers*. Namun AS menolak tuduhan tersebut dan memutuskan untuk keluar dari perjanjian ini tepatnya pada 2 Agustus 2019.

AS menyampaikan bahwa keputusan AS keluar dari perjanjian ini ialah murni karena pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia. Namun sebenarnya ada tujuan yang hendak dicapai oleh AS terkait keputusannya keluar dari perjanjian ini. Tujuan tersebut ialah untuk mengejar kepentingan nasional pertahanannya disebabkan dilema keamanan yang dirasakan oleh AS karena kapabilitas senjata rudal milik China. Selama hampir dua dekade China telah mengalami peningkatan kapabilitas militer yang cukup signifikan terutama dalam pengembangan senjata rudal miliknya. China bukanlah salah satu negara penandatangan perjanjian INF, hal tersebut menjadikan keuntungan bagi pihaknya untuk bebas mengembangkan senjata rudal GLCM. China yang muncul sebagai kekuatan baru diwilayah Asia Pasifik lantas menjadikan AS merasakan *security dilemma* terutama dalam peningkatan kapabilitas rudal miliknya. AS yang tergabung didalam perjanjian INF mengalami keterbatasan dalam menyaingi hegemoni China diwilayah Asia Pasifik. Kapabilitas yang unggul dari rudal milik China telah menjadi ancaman bagi pertahanan pangkalan udara AS yang terdapat di wilayah Pasifik Barat.

Saat ini hampir 95% rudal milik China merupakan rudal jarak menengah yang dilarang didalam perjanjian ini. China menerapkan sistem *anti-access/area-denial* yang bertujuan untuk memblokir akses militer AS diwilayah hotspot konflik yakni Laut China Selatan. Dengan melakukan penempatan senjata rudal jarak menengah yang menjadi ancaman AS. Terutama pangkalan udaranya yang terletak di Guam termasuk kedalam jangkauan rudal balistik milik China yakni DF-26. Para petinggi militer AS juga telah menyuarakan kekhawatirannya terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh China ini. Dengan memutuskan keluar dari perjanjian ini maka AS akan mampu memberikan tekanan strategis terhadap China. Pasca mundurnya AS dari perjanjian ini, AS telah memulai melakukan pengembangan

kembali senjata rudal balistik jelajah daratnya dan telah melakukan dua kali uji coba rudal GLCM miliknya yang pertama pada tanggal 18 Agustus di Pulau San Nicolas, California, dan yang kedua pada tanggal 12 Desember 2019 di Vendeberg, California.

6.2 Saran

1. Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran situasi dilema keamanan yang dirasakan oleh AS sebagai salah satu negara adidaya terhadap kekuatan baru yang muncul di wilayah Asia Pasifik yakni China. Oleh sebab itu penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan lebih dalam untuk melihat dampak apa yang ditimbulkan dari keputusan AS untuk keluar dari perjanjian INF dan upaya China yang berusaha menjadi kekuatan besar di wilayah Asia Pasifik.

2. Saran Praktis

Keputusan AS untuk keluar dari perjanjian INF merupakan keputusan yang dianggap rasional didalam mencapai kepentingan negaranya, akan tetapi hal tersebut juga akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi keamanan rudal dunia. Maka perlunya ada negosiasi perjanjian baru yang mengatur pembatasan kepemilikan senjata rudal bagi negara-negara didunia terutama AS, China dan Rusia yang saat ini sedang berlomba saling meningkatkan kapasitas rudal milik mereka. Salah satunya dengan mengadakan diskusi atau negosiasi triateral antara AS, China dan Rusia sebagai bentuk kerjasama pengendalian senjata rudal demi keamanan dimasa yang akan datang. Upaya triateral diharapkan berfokus untuk menjaga stabilitas dan mengurangi resiko ancaman yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata rudal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alexander Wendth, J. S. (2014). *Metodelogi Ilmu Hubungan Internasional Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif*. Malang: Intrans Publishing.

Ali Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media .

Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. London: Palgrave Macmillan.

Douglas Barrie, M. E. (2020). The End of The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty: Implication for Asia . Dalam *Asia Pasific Regional Security Assesment 2020* (hal. 30). London: The International Institute for Strategic Studies.

Heywood, A. (2011). *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan.

Sandu Siyoto, A. S. (2015). *Dasar Metodelogi penelitian* . Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono, P. D. (2015). *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia.

Suryani, D. U. (2017). *Dasar-dasar Hubungan Internasional* . Depok: Kencana.

Laporan & Penelitian:

Amy F, W. (2019). *Russian Compliance with The Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty: Background and Issues for Congress*. California: Congressional Research Service.

Avis Bohlen, W. B. (2012). *The Intermediate Range Nuclear Forces Treaty History and Lessons Learned*. New York: The Brookings Institution.

David W. Kern, J. (2012). *Facing the Missile*. California: the RAND Corporation

Heginbotham, E. (2015). *The U.S.-China Military Scorecard*. California: RAND Corporation.

Jacob Stokes. (2019). *China's Missile Program and U.S. Withdrawal from the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty*. US-China Economic and Security Review Commission.

Kuczyński, G. (2019). *INF Treaty U.S- Russian Outdated Pact*. Poland: Warsaw Institute.

Mark Etherton, A. E. (2019). *Missile Misdemeanours: Russia and the INF Treaty*. London: Authority of the House of Commons.

Mills, C. (2019). *Demise of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty*. London: UK Parliament House of Commons Library .

Ulrich Khun, A. A. (2020). *Trilateral Arms Control Perspectives from Washington, Moscow, and Beijing*. Humburg: Institute for Peace Research and Security Policy .

Woolf, A. F. (2019). *U.S. Withdrawal from the INF Treaty*. California: CRS Insight.

Jurnal:

Amanda B. (2019). How the INF is Failing. *International Treaties in Deterrence*, 1-3.

Alexander Lanoszka. (2019). The INF Treaty: Pulling Out in Time. *Strategic Studies Quarterly Vol:13 No:2*, 52-53.

Clinton, W. (1986). The National Interest: Normative Foundations. *The Review of Politics, Vol:48 No:4*, 495.

Cuomo, Scott A. (2018). It's Time to Make a New Deal Solving the INF Treaty Strategic Liabilities to Achieve U.S. Security Goals in Asia. *Texas National Security Review Vol: 2 No:1*, 105-122.

Emilia Yustiningrum. (2007). Masalah Kepemilikan Nuklir. *Jurnal Penelitian Politik Vol 4, No 1*, 19.

Emmers, R. (2014). ASEAN's Search for Neutrality in the South. *Asian Journal of Peacebuilding Vol:2 No:1*, 67.

- Fakhrunisa. (2019). Analisa Penarikan Diri Amerika Serikat Dalam Perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces 2018. *Jurnal Hubungan Internasional, Vol: 7 No:3*, 1-2.
- Fenny Rizka, D. Y. (2019). Security Dilemma dalam Ketegangan AS-Iran Pasca Serangan Kapal Tanker di Teluk Oman. *Jurnal ICMES Vol:3, No:2*, 209.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol: 22, No: 1*, 74-79.
- Justin V, A. A. (2019). The INF Treaty: A Spectacular, Inflexible, Time-Bound Success. *Strategic Studies Quarterly Vol 13 (1)*, 91-102.
- Lanoszka, Alexander. (2019). The INF Treaty: Pulling Out in Time. *Strategic Studies Quarterly Vol: 13 No:2*, 52-56.
- Marga Rettha Yuliana P.S, Adi Putra S, Penny Kurnia P. (2019). Analisis Realisme Ofensif Amerika Serikat Keluar dari Intermediate Range Nuclear Force Treaty (INF Treaty) pada 2019. *Jurnal Hubungan InternasionalL, Vol 1, No 1*, 1-11.
- Melita A.B, M. M. (2018). Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol:1 No:1*, 3.
- Michael A Mehling, d. (2019). United States Initiates Withdrawal from Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. *American Journal of International Law Vol:113 No:3*, 631.
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making. *British Journal of International Studies Vo:2 No:3*, 246-266.
- Prasetya, D. M. (2012). Strategi Defensif China dalam Merespon Kebijakan Amerika Serikat atas Taiwan. *Jurnal Studi Hubungan Internasional Vol:2 No:1*, 61.
- Planifolia, V. (2017). Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional Vol:6 No:1*, 5.

Satris, R. (2015). Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik . *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol:1 No:1*, 96.

Suwarman, W. D. (2018). Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat- Tiongkok di Myanmar. *Jurnal Asia Pasifik Studies Vol 2 No 2*, 182.

Syahrin, M. N. (2018). China versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya di Kawasan Asia Pasifik. *Global & Strategis, Vol: 12 No:1*, 147.

Ulrich Kuhn, A. P. (2019). Russia, NATO, and the INF Treaty. *Strategic Studies Quarterly Vol:11 No:1*, 68-70.

Skripsi:

Probowisesa, A. (2014). *Prospek New Strategi Arms Reduction Treaty Dalam Kepemilikan Senjata Nuklir Amerika Serikat dan Rusia*. Makassar: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.

Website:

Amanda Onion, M. S. (2019). *Arms Race*. Diakses pada 29 September 2020, dari History: <https://www.history.com/topics/cold-war/arms-race>

Baek, J. (2019). *The Impact of the Abrogation of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty on Strategic Situation in Northeast Asia*. Diakses pada 25 Maret 2021, dari [Global Ink: https://www.globalink.org/upload/commentary/96c976642063c22dd4f0c45bcbcd3c9a.pdf](https://www.globalink.org/upload/commentary/96c976642063c22dd4f0c45bcbcd3c9a.pdf)

BBC. (2020). *BBC News Indonesia*. diakses pada 4 Juni 2021 dari Laut China Selatan: Aksi China Memburu Sumber Daya 'Melanggar Hukum', Kata Menlu AS : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53399174>

- Bendini, R. (2016). *Europaran Parliament Think Tank*. Diakses pada 28 Maret 2021, dari United States - China Relations: a Complex Balance between Cooperation and Confrontation:
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_IDA%282016%29570464
- Coast, D. (2018). *Office of the Director of National Intelligence*. Diakses pada 19 Maret 2021, dari Director of National Intelligence Daniel Coast on Russia's Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty Violation :
<https://www.dni.gov/index.php/newsroom/speeches-interviews/item/1923-director-of-national-intelligence-daniel-coats-on-russia-s-inf-treaty-violation>
- Eckstein, M. (2017). *USNI News*. Diakses pada 31 Maret 2021, dari PACOM: U.S. Should Renegotiate INF Missile Treaty to Better Compete with China:
<https://news.usni.org/2017/04/27/pacom-u-s-should-renegotiate-inf-treaty-that-limits-conventional-mid-range-missiles>
- Febrian, R. (2019). *Mengenang Runtuhnya Uni Soviet 26 Desember*. Diakses pada 7 Juli 2021, dari VOi.id Memori Mengenang Runtuhnya Uni Soviet:
<https://voi.id/memori/1156/mengenang-runtuhnya-uni-soviet-26-desember>
- USA.gov. (2017, Januari 20). *U.S. Departement of State*. Diakses pada 26 Mei 2021, dari Treaty Between The United States Of America And The Union Of Soviet Socialist Republics On The Elimination Of Their Intermediate-Range And Shorter-Range Missiles (INF Treaty): <https://2009-2017.state.gov/t/avc/trty/102360.htm>
- Kimball, D. (2019). *Arms Control Association*. Diakses pada 19 Januari 2021, dari The Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty at a Glance:
<https://www.armscontrol.org/factsheets/INFtreaty>
- Kingston Reif, S. B. (2020). *Arms Control Association*. Diakses pada 4 April 2021, dari U.S. Test Second Medium-Range Missile: <https://www.armscontrol.org/act/2020-01/news/us-tests-second-medium-range-missile>

- Kresier, O. (2013, Desember). *Air Forces Magazine*. Diakses pada 4 Juni 2021, dari China's Carrier Killer: Threat and Theatrics : <https://www.airforcemag.com/PDF/MagazineArchive/Documents/2013/December%202013/1213china.pdf>
- Kurniadi. (2020, Oktober 6). *Lintas Pakar*. Diakses pada 4 Juni 2021, dari Rivalitas China, AS dan ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan: <https://www.untan.ac.id/rivalitas-china-as-dan-asean-dalam-sengketa-laut-china-selatan/>
- Levine, N. (2018). *The National Interest*. Diakses pada 2 April, 2021, dari Why America Leaving INF Treaty is China's New Nightmare: <https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-america-leaving-inf-treaty-chinas-new-nightmare-34087>
- Martin, D. (2019). *CBC News*. Diakses pada 2 April 2021, dari U.S. conducts first cruise missile test since withdrawal from INF Treaty with Russia: <https://www.cbsnews.com/news/u-s-conducts-first-cruise-missile-test-since-withdrawal-from-inf-treaty-with-russia/>
- Michael, S. (2019). *Defense Visual Information Distribution Service*. Diakses pada 28 Juni 2021 dari Test Launch at Vandenberg Air Force base : <https://www.dvidshub.net/video/728792/test-launch-vandenberg-air-force-base>
- MDAA. (2018). *Missile Defense Advocay Alliance*. Diakses pada 5 April 2021, dari Anti Access- Area Denial Tiongkok : <https://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/china/china-anti-access-area-denial/>
- Mike, Y. (2019). *China unveils drones, missiles and hypersonic glide vehicle at military parade*. Diakses pada 4 Juni 2021, dari Defense News : <https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2019/10/01/china-unveils-drones-missiles-and-hypersonic-glide-vehicle-at-military-parade/>

- Minghao, Z. (2018). *Global Times*. Diakses pada 2 April 2021, dari INF withdrawal indicates disruption of global arms control systems: <https://www.globaltimes.cn/content/1124325.shtml>
- Muhlisin. (2012). *Refrensi Makalah*. diakses pada 21 Januari 2021 dari: <https://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-unit-analisis-dalam-penelitian.html>
- Picardo, C. D. (2019). *Central European Insitute of Asian Studies*. Diakses pada 25 Maret 2021, dari How the demise of the INF Treaty could reverberate in Asia Pacific: <https://ceias.eu/demise-of-inf-treaty-asia-pacific/>
- Pifer, S. (2018). *Russia denies it violates the INF Treaty. OK, show it*. Diakses pada 30 September 2020, dari Brookings: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/01/22/russia-denies-it-violates-the-inf-treaty-ok-show-it/>
- Reif, K. (2020). *Arms Control Association*. Diakses pada 4 April 2021, dari U.S. Continues Intermediate-Range Missile Pursuit: <https://www.armscontrol.org/act/2020-06/news/us-continues-intermediate-range-missile-pursuit>
- Reuters. (2019). *Japan Times*. Diakses pada 4 April 2021, dari U.S. tests ground-launched ballistic missile after INF treaty exit: <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/13/world/u-s-tests-ground-launched-ballistic-missile-inf-treaty-exit/>
- RFERL. (2019). *Radio Free Europe Radio Liberty*. Diakses pada 4 April 2021 dari U.S. Tests Ballistic Missile After Exit From INF Treaty : <https://www.rferl.org/a/u-s-tests-ballistic-missile-after-exit-from-inf-treaty/30323371.html>
- Schmidt, B. (2018). *DOC Research Institute*. Diakses pada 27 Maret 2021, dari Hegemony: A Conceptual and Theoretical Analysis: <https://doc-research.org/2018/08/hegemony-conceptual-theoretical-analysis/>
- Sugihartini, H. (2019). *Forum Kajian Pertahanan Maritim*. Diakses pada 2 April 2021, dari Implikasi Berakhirnya INF Treaty: Keamanan Kawasan dan Kewajiban Angkatan

Laut: <https://www.fkpmar.org/implikasi-berakhirnya-inf-treaty-keamanan-kawasan-dan-kewajiban-angkatan-laut/>

U.S. Mission Russia. (2017). *U.S. Embassy & Consulates in Russia*. Diakses pada 21 Maret 2021, dari 30th Anniversary of the INF Treaty: Under Secretary Thomas A. Shannon's Interview with Kommersant daily: <https://ru.usembassy.gov/30th-anniversary-inf-treaty-secretary-thomas-shannons-interview-kommersant-daily/>

VOA. (2019). *VOA Indonesia*. Diakses pada 22 Maret 2021, dari AS Keluar dari Perjanjian INF: <https://www.voaindonesia.com/a/as-keluar-dari-perjanjian-inf/5026641.html>

Xinhua. (2019). *Xinhua NET*. Diakses pada 2 April 2021, dari U.S. test new ground-based missile after withdrawing from INF Treaty: http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/20/c_138321576.htm